

**KEPATUHAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN FUNGSI AUDIT
SYARIAH DITINJAU DARI FILOSOFI KEUANGAN ISLAM
(Studi Kasus Pada PT. BANK Sulselbar Syariah Makassar)**



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana
Ekonomi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh

HARIYANTI
Nim: 10 800 11 1049

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertantangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Makassar, 15 Januari 2017

Penyusun,

HARIYANTI
NIM : 10800111049



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong – Gowa Tlp. 424835 Fax.424836

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **HARIYANTI**, Nim: **10800111049**, Mahasiswi program studi strata satu (S1) jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul “**Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah dan Fungsi Audit Syariah Ditinjau Dari Filosofi Keuangan Islam (Studi Kasus Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar)**”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan dan diproses selanjutnya.

Samata, 07 Februari 2017

Pembimbing I

Dr. Muh. Wahyuddin A., SE, M. Si., Ak.
NIP: 197305252 200801 1 017

Pembimbing II

Drs. Thamrin Logawali, M. H.
NIP: 19551024 198703 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul **“Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah dan Fungsi Audit Syariah Ditinjau Dari Filosofi Keuangan Islam Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Sulselbar Syariah Makassar)”**, yang disusun oleh **Hariyanti**, NIM: **10800111049**, mahasiswa jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 2017, bertepatan dengan 20 Jumadil Awal 1438 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

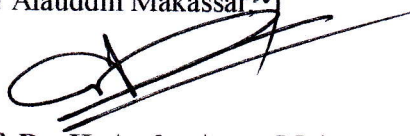
Makassar, 16 februari 2017 M

20 Jumadil Awal 1438 H

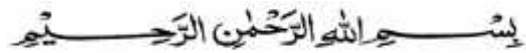
DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Memen Suwandi, SE., M.Si	(.....)
Penguji II	: Saiful Muchlis., SE., M.SA., Akt., CA	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muh. Wahyuddin A., SE., M.Si., Ak.	(.....)
Pembimbing II	: Drs. Thamrin Logawali, MH	(.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah (Subhanahu Wata’ala) yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan yang Rabb limpahkan. Atas perkenaan-Mu jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam “Allahumma Shalli Sayyidina Muhammad” juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul **“KEPATUHAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN FUNGSI AUDIT SYARIAH DITINJAU DARI FILOSOFI KEUANGAN ISLAM (Studi Kasus Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar)”** penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak dapat lepas dari doa, bimbingan, dorongan, dan bantuan baik material maupun spritual dari Ayahanda H. Daccang dan Ibunda Hj. Dakking serta dari berbagai pihak, oleh karena itu izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Jamaluddin majid, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi serta Bapak Memen Suwandi, S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak Andi Wawo, SE., M.Sc., Akt. selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihat dan semangat dalam kuliah.
5. Bapak Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak, sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Thamrin Logawali, M. H. Selaku dosen pembimbing II yang juga telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Bapak pimpinan dan staf karyawan PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu selama proses penelitian.
9. Keluarga tercinta, terkhusus kakak tercinta, H. Muh. Ali Dg. Rani dan Hj. Bungatia Dg. Puji, terima kasih atas dukungan, do'a, bantuan dan semangat yang terus diberikan kepada adikmu dalam menyelesaikan pendidikan. Tidak

lupa untuk keponakan yang selalu setia untuk direpotkan Muh. Akbar Lantara dan Rahmat Al-Qadri dan Nur Aulya Az Zahra.

10. Kepada sahabat Akuntansi 3,4 terima kasih atas dukungannya Fera, Armha, Ani, dan sahabat yang belum sempat disebut namanya. Terimakasih untuk seluruh masyarakat Akuntansi angkatan 2011 AK 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang tidak dapat disebut namanya satu per satu yang telah banyak membantu.
11. Teman-teman KKN Angkatan 50 Desa Taccimpo Kab. Sidrap atas dukungan dan inspirasinya teman-teman.
12. Adik tercinta, Rahmitha, terima kasih atas dukungan moril dan do'a yang selalu terpanjat untukku serta selalu siap direpotin olehku. Cukup Allahlah sebaik-baik pembalas kebaikan. Aamiin.
13. Serta kepada seluruh teman-teman dan pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tak mampu penulis untuk menyebutkan satu per satu, terima kasih atas do'a dan sarannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Gowa, 23 Januari 2017

HARIYANTI
NIM: 10800111049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-15
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORETIS	16-38
A. <i>Shari'ate Enterprise Theory</i>	16
B. Filosofi Keuangan Islam Menurut Saleh MD. Arman	19
C. Dewan Pengawas Syariah	22
D. Audit dalam Pandangan Syariah	32
E. Kerangka Teoretis	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39-52
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Instrument Penelitian	45
F. Teknik Analisis Data	45
G. Validitas dan Realibilitas Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN	53-83
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	53
B. Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah Ditinjau Dari Filosofi Keuangan Islam Pada Lembaga Keuangan Syariah.....	57
C. Fungsi Audit Syariah Ditinjau Dari Filosofi Keuangan Islam Pada Lembaga Keuangan Syariah	71
D. Keterkaitan Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah Dan Fungsi Audit Syariah Ditinjau Dari Filosofi Keuangan Islam Pada Lembaga Keuangan Syariah	78
BAB V PENUTUP.....	84-85
A. KESIMPULAN	84
B. SARAN	85
C. KETERBATASAN PENELITIAN.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

1.1 Kerangka Teoretis	37
-----------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	4
---	---

ABSTRAK

NAMA : HARIYANTI
NIM : 10800111049
JUDUL : KEPATUHAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN
FUNGSI AUDIT SYARIAH DITINJAU DARI FILOSOFI
KEUANGAN ISLAM (Studi Kasus Pada PT. Bank Sulselbar
Syariah Makassar)

Filosofi keuangan islam merupakan karakter yang melekat pada lembaga keuangan syariah. Adanya filosofi keuangan islam yang menerapkan transaksi tanpa riba menjadikan perbankan syariah sebagai wadah yang dipercayai oleh nasabah. Fenomena yang ada masih menunjukkan banyaknya anggapan masyarakat terhadap perbankan syariah bahwa masih sekedar label semata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan filosofi keuangan islam pada dewan pengawas syariah (DPS) dan audit syariah dalam perbankan syariah. DPS dan audit syariah sebagai bagian penting dalam perbankan syariah menjadikan perbankan syariah sebagai lembaga yang terpercaya dalam mengelola dana dari investor.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian pada PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar. Peneliti mengambil data dengan teknik wawancara dan beberapa data sekunder pendukung lainnya dari situs resmi entitas.

Hasil penelitian menunjukkan adanya penerapan filosofi keuangan islam pada dewan pengawas syariah (DPS) dan audit syariah yang signifikan. Dengan penerapan filosofi keuangan islam pada perbankan syariah menjadikan perbankan lebih terpercaya dalam pelaksanaan operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya filosofi keuangan islam membuat perbankan syariah dapat mempertahankan eksistensinya dalam perekonomian.

Kata kunci: *Bank Syariah, filosofi keuangan islam, Dewan pengawas Syariah, Audit Syariah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak adanya perbankan, lembaga ini memudahkan masyarakat untuk mendapat dana dalam rangka membangun usaha atau sekedar melanjutkan kehidupannya di sistem sekarang. Awal perkembangan perbankan di mulai dari perbankan konvensional yang menjadi sandaran masyarakat. Cara mendapatkan dananya terbilang mudah tetapi *feedback* yang berlangsung sangat memberatkan karena menggunakan sistem bunga yang dikatakan dalam Islam itu adalah riba dan Allah telah melarang untuk melakukan riba tersebut. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Ali-Imran/3: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat di atas memiliki kandungan bahwa setiap manusia yang beriman maka haruslah menghindari riba. Baik bunga (riba) yang berupa tambahan dalam hutang piutang maupun bunga berbunga (berlipat ganda). Hal tersebut merupakan larangan yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim dan seruan untuk bertaqwa kepada Allah swt. Sehingga manusia bisa mendapatkan keberuntungan. Riba pun tidak memberikan kemaslahatan kepada pelakunya. Walaupun secara kasat mata

kita melihat terdapat penambahan nilai maka itu hanya ilusi semata. Dalam hal ini Allah telah menegaskan hal tersebut dalam QS Ar Ruum/30: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Ayat diatas menunjukkan bahwa justru yang akan melipat gandakan harta manusia adalah zakat bukan pada riba. Pada zakat, secara teknis seorang manusia mengeluarkan hartanya tetapi hal itu tidak membuat hartanya berkurang justru malah bertambah. Karena zakat merupakan perilaku yang diridhai oleh Allah sedangkan riba adalah hal yang dilarangnya. Karena itu hadirilah perbankan syariah untuk mensuburkan perilaku mengeluarkan zakat dan aktifitas lainnya agar kegiatan pelaku ekonomi sesuai dengan keridhaan Allah swt.

Muncullah perbankan syariah sebagai solusi bagi masyarakat, ternyata hal ini membuat masyarakat tertarik dan perbankan syariah mengalami perkembangan sebagai subsistem dalam perekonomian syariah. Bank syariah sebagai konsep perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah islam kedalam semua transaksi perbankan telah menjadi pilihan baru dalam menabung di masyarakat (Rizal, 2012: 1). Selain itu sudah banyak perbankan syariah yang bermunculan. Seperti yang bisa kita lihat sekarnag, sudah banyak perbankan konvensional yang menyiapkan pembiayaan syariah bahkan mendirikan cabang perbankan syariah.

Munculnya perbankan syariah bukan hanya di dalam negeri tetapi di luar negeripun banyak berjamuran perbankan syariah. Seperti di Mesir, Kanada, Kuwait, Bahrain, Siprus, Iran, Turki, Malaysia, Inggris dan sebagainya.

Terlepas dari banyaknya perbankan yang bermunculan, masyarakat juga senantiasa mengawasi pertumbuhan dan menyeleksi perbankan yang ada. Karena masih ada yang mengidentikkan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Sebagian besar dari mereka masih menyimpulkan bahwa mekanisme perbankan syariah tidak berbeda dengan konvensional (Primasari (Rahmanti, 2013: 63). Lebih jauh mereka mengungkapkan bahwa ternyata LKS hanyalah institusi konvensional yang menggunakan bahasa Arab untuk identifikasi produk dan transaksinya. Dikarenakan sistem perbankan syariah diadopsi dari perbankan konvensional sehingga masih ada yang menganggap perbankan syariah dan konvensional masih sama (Rahmanti, 2013: 63). Selain itu, merespon kuatnya tuntutan masyarakat agar bank syariah lebih menunjukkan “keIslamianya”, maka pada tanggal 15-16 Juni 1997 MUI dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) memutuskan untuk mengeluarkan suatu aturan (fatwa) bahwa setiap bank syariah wajib memiliki suatu badan khusus yang merupakan bagian dari sistem organisasi bank syariah, yang bertugas mengawasi proses kegiatan dan aktivitas operasional bank syariah agar tetap berpegang pada ajaran Islam dan tidak melenceng dari nilai-nilai syariah dalam proses kegiatan usahanya. Sehingga menyikapi akan adanya tuntutan tersebut, maka MUI pada Tanggal 1 Januari 1999, secara resmi membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi dijalkannya proses operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam pada bank syariah yang

kemudian disyahkan dan dinamakan Dewan pengawas Syariah (DPS) (Widyanto (2010: 1580).

Menurut Ismail (2014, 38) mengatakan bahwa perbedaan yang lain selain adanya dewan pengawas syariah (selanjutnya disebut DPS) pada perbankan syariah:

No.	Bank Syariah	No.	Bank Konvensional
1.	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	1.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2.	<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah	2.	<i>Return</i> bank yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3.	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	3.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4.	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	4.	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	5.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur
6.	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	6.	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.
7.	Penyelesaian sengketa diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	7.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

Sumber: Drs. Ismail MBA, Ak, *Perbankan Syariah*, 2014, Kencana Group, Jakarta.

Hal di atas dapat membuat masyarakat bertambah yakin bahwa perbankan syariah akan lebih baik daripada perbankan konvensional. Poin di atas digabungkan dengan keberadaan DPS menjadi poin yang istimewa dan nilai tambah bagi perbankan syariah sehingga DPS bisa dikatakan sebagai organ vital perbankan. Selain itu, tentunya semua umat Islam mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai wahana *amar ma'ruf nahi munkar*, khususnya dalam bidang perbankan sebagai urat nadi perekonomian umat (Abidin, 2011: 79).

Tugas mengawasi dan mengontrol kebijakan adalah amanah yang telah diberikan perusahaan dan mitra kepada dewan pengawas syariah (DPS). Konsekuensinya adalah memberikan pelayanan yang maksimal melalui pelaksanaan tanggungjawab. Karena DPS merupakan bagian dari *Shari'ah Enterprise Theory* (selanjutnya disebut SET), dimana pertanggungjawabannya dari sisi “ketundukan dan kepatuhan” menjalankan syariah yang tercantum dalam Islam.

Selain adanya DPS, yang akan menunjang kinerja perbankan syariah supaya maksimal, harus ada audit syariah, sebagaimana landasan syariah dari pelaksanaan audit syariah antara lain dapat dirujuk pada QS. Al Hujurat/6: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu".

Ayat diatas menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting, mengingat keduanya dapat menjadi sumber malapetaka ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secara maksimal (Minarni (2013: 33).

Keberadaan DPS adalah untuk menilai kepatuhan karyawan bank syariah terhadap kebijaksanaan, prosedur dan peraturan-peraturan yang dibuat bank tersebut sehingga proses atau kegiatan perbankan yang mereka lakukan akan terawasi dan terkontrol dengan baik sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Adanya audit syariah yang memeriksa informasi dalam laporan keuangan dan DPS yang mengontrol operasional bank syariah maka membuat bank syariah itu sendiri semakin kuat dan semakin dipercaya oleh masyarakat.

Dibentuknya dua hal penting tersebut yaitu DPS dan audit syariah maka harapan baru muncul bahwa pengaturan perbankan akan lebih baik kedepannya, tetapi melihat fenomena yang terjadi saat ini dalam praktik pengawasan syariah di perbankan syariah di Indonesia adalah peran vital DPS belum berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan. Banyak dari mereka tidak berperan sama sekali dalam mengawasi operasional perbankan syariah. Sebagaimana diketahui bahwa DPS harus mengawasi dan memeriksa format dan akad dalam bank, bagaimana bank syariah menjalankan restrukturisasi, *reschedule*, cara penetapan margin dan lain sebagainya.

Pada tesis yang diteliti oleh Hayyi, Abdul (2011: vi) yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengawasan dewan pengawas syariah BPR syariah di Kota Mataram adalah tidak efektif dimana minimnya frekuensi pengawasan menjadi indikator utamanya. Begitupun audit syariah, dengan berjalannya audit pada koridor tujuan syariah akan memberikan dampak yang signifikan seperti yang diungkapkan oleh Minarni (2013: 39) dalam jurnal ekonomi islam bahwa audit syariah hendaknya dijalankan sesuai mekanisme yang benar dan disesuaikan dengan standar audit AAOFI yang berlaku pada seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Segala kelemahan yang ada dalam sistem audit, seperti faktor *human error*, *asymmetric information*, dan lainnya hendaklah diminimalkan untuk mencapai hasil yang tepat.

DPS adalah pendukung untuk audit syariah, sebagaimana tertera dalam Standar Auditing AAOIFI untuk audit pada lembaga keuangan syariah sendiri mencakup lima standar, yaitu tujuan dan prinsip (*objective and principles of auditing*), laporan auditor (*auditor's report*), ketentuan keterlibatan audit (*terms of audit engagement*), lembaga pengawas syariah (*shari'a supervisory board*), tinjauan syariah (*shari'a review*) (Karim, 1999: 2).

DPS dan audit syariah yang menunjang hidup perbankan juga harus didukung dengan aturan perbankan yang berlandaskan pada syariah. Dimana hal ini bisa didapatkan melalui *shari'ate enterprise theory*. Sebagaimana diungkapkan dalam simposium nasional akuntansi oleh Triyuwono (2007: 4) *Syariah Enterprise Theory (SET)* tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET

memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Menurut SET, *stakeholders* meliputi Allah, manusia, dan alam.

Allah merupakan pihak tertinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Menjadikan Allah sebagai *stakeholders* tertinggi membangkitkan kesadaran manusia akan halnya manusia hanyalah seorang hamba yang butuh penciptanya. Karena aturan dan hukum Allah telah diberikan, maka aturan dan hukum yang dilaksanakan manusia hanya berlandaskan pada aturan dan hukum Allah semata. Sedangkan manusia dan alam adalah hasil dari kinerja perbankan yang membutuhkan kesejahteraan.

Hal tersebut menandakan bahwa segala aktifitas dewan pengawas syariah harus berdasarkan pada aturan dan hukum Allah swt. Dalam OMAN *chapter* Arman (2013: 1) menyebutkan bahwa dewan pengawas syariah tidak lepas dari filosofi keuangan Islam yang menjunjung tinggi sifat *adl* dan ihsan. Sifat *adl* atau adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya sedangkan ihsan dalam syariah berfungsi sebagai alat control dan evaluasi terhadap bentuk-bentuk kegiatan ibadah, sehingga aktivitas manusia akan lebih terarah dan maju. DPS dan audit syariah yang merupakan dua organ vital yang berpengaruh dalam perbankan syariah. Kepatuhan DPS dan fungsi audit syariah juga merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah.

Dari paparan diatas, peran DPS sebagai organ vital belum berjalan dengan maksimal maka akan mempengaruhi audit syariah sehingga masih perlu ditelusuri kepatuhan dewan pengawas syariah dan fungsi audit syariah ditinjau dari filosofi

keuangan Islam. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian mendalam terhadap hal tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa perbankan adalah salah satu urat nadi perekonomian.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus terhadap pengembangan pada studi keilmuan ekonomi yang berbasis syariah dan lebih spesifiknya pada pengembangan keilmuan akuntansi syariah. Dengan melihat dan membandingkan antara prinsip syariah yang ada (teori) dengan apa yang telah diaplikasikan pada praktik perbankan syariah. Objek dalam penelitian ini adalah perbankan syariah, dimana dewan pengawas syariah dan audit syariah yang akan menjadi titik fokusnya.

Secara spesifik fokus yang akan menjadi titik perhatian yaitu:

1. Kepatuhan dewan pengawas syariah ditinjau dari filosofi keuangan islam bahwa dewan pengawas syariah yang berada diperbankan dilihat kembali bentuk kepatuhannya yang sesuai dengan filosofi keuangan islam sebagaimana awal dibentuk bagian perbankan tersebut.
2. Fungsi audit syariah ditinjau dari filosofi keuangan islam, maksudnya adalah audit syariah yang dilakukan harus sejalan dengan asas syariah.
3. Keterkaitan kepatuhan dewan pengawas syariah dan fungsi audit syariah yang menopang kerja perbankan, maka yang harus dilakukan adalah pengawas dalam hal ini dewan pengawas syariah harus bisa bekerjasama dengan audit syariah, karena kedua bagian perbankan ini adalah hal yang vital untuk perbankan yang akan menentukan keberlanjutan perbankan.

C. Rumusan Masalah

Sebagai urat nadi perekonomian, perbankan sangat memegang peran penting terutama dewan pengawas syariah dan audit syariah. Audit syariah yang memiliki tugas memberikan laporan sebagai hasil kinerja perusahaan akan membuat para nasabah sebagai mitra semakin yakin dengan perbankan syariah. Kepercayaan ini akan terwujud jika dewan pengawas syariah dan audit syariah menjalankan tugas dengan semestinya, tanpa ada penyelewengan atau kecurangan yang terjadi.

Tetapi melihat dari peran DPS dan audit syariah yang belum maksimal dan belum menjalankan tugas secara optimal, untuk itu penulis akan mengupas hal tersebut dalam tulisan ini, melalui rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan dewan pengawas syariah ditinjau dari filosofi keuangan Islam pada lembaga keuangan syariah?
2. Bagaimana fungsi audit syariah ditinjau dari filosofi keuangan Islam pada lembaga keuangan syariah?
3. Bagaimana keterkaitan kepatuhan dewan pengawas syariah dan fungsi audit syariah ditinjau dari filosofi keuangan Islam pada lembaga keuangan syariah?

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang berhubungan dengan kepatuhan dewan pengawas syariah dan audit syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya:

Rochaeli, Ira Wati, dengan judul penelitian fungsi dan peranan dewan pengawas syariah di unit usaha syariah PT. Bank “X” dikaitkan dengan pelaksanaan *good corporate governance* (GCG), adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitiannya yaitu penelitian yuridis-normatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan Rochaeli menunjukkan bahwa peran dewan pengawas syariah penting dan perlu dioptimalkan dengan mempunyai komitmen untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan.

Hayyi, Abdul, dengan judul penelitian efektifitas pengawasan bank syariah studi terhadap pengawasan syariah BPR syariah di Kota Mataram, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan Hayyi menunjukkan bahwa pelaksanaan DPS tidak efektif karena minimnya frekuensi pengawasan menjadi indikator utama.

Shafii, Zurina, dkk dalam melakukan penelitian menemukan bahwa penerbitan terbaru kerangka tata kelola Syariah oleh Bank Negara Malaysia telah menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pembentukan audit syariah dan akibatnya, terhadap peran Komite Syariah. Tujuan dari makalah ini untuk mempelajari tentang dampak fungsi audit Syariah terhadap peran Komite Syariah berkaitan dengan pelaksanaan jabatan kerangka tata kelola syariah. Studi ini mengadopsi penelitian studi kasus tunggal. Temuan dari wawancara secara mendalam mengungkapkan bahwa fungsi audit syariah memiliki nilai tambah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Penelitian ini juga memberikan masalah yang menantang yang dihadapi oleh Komite Syariah dari pembentukan dipilih. Oleh karena itu, diyakini bahwa penelitian ini dapat

dimanfaatkan oleh IFI lain dalam meningkatkan struktur Komite Syariahnya. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk menguji efek setelah pelaksanaan penerapan kerangka tata kelola Syariah dalam konteks fungsi lain seperti penelitian Syariah, manajemen risiko Syariah dan Direksi.

Minarni, seperti yang diungkapkan dalam artikel yang berjudul konsep pengawasan, kerangka audit syariah, dan tata kelola lembaga keuangan syariah ini menganalisis beberapa konsep penting, yaitu pengawasan pada lembaga keuangan syariah, kerangka audit syariah, dan tata kelola perusahaan bagi lembaga keuangan syariah. Kajian dilakukan dengan studi pustaka mengacu pada kajian terdahulu terkait topik yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan pada bank syariah, audit syariah dan tata kelola perusahaan tidak berarti dapat menggantikan tugas manajemen bank dan tidak menjamin bank bebas dari krisis, kerugian maupun kebangkrutan. Untuk itu Bank Indonesia hendaknya mendukung kegiatan pengawasan perbankan Syariah yang melibatkan DSN dan DPS. Dengan memberikan jaminan independen, insentif yang bernilai dan pertanggungjawaban yang jelas. Adapun untuk kegiatan audit Syariah hendaknya dijalankan sesuai mekanisme yang benar dan disesuaikan dengan standar audit AAOFI yang berlaku pada seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Segala kelemahan yang ada dalam sistem audit, seperti faktor *human error*, *asymmetric information*, dan lainnya hendaklah diminimalkan untuk mencapai hasil yang tepat.

Penelitian diatas telah membuktikan bahwa dewan pengawas syariah dan audit syariah sangat berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Tetapi belum ada yang melakukan penelitian yang mengaitkannya dengan filosofi keuangan islam.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk meneliti dengan mengaitkan filosofi keuangan islam terhadap dua organ vital yang sangat berpengaruh ini terhadap perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah dan audit syariah merupakan pilar penting dalam perbankan syariah, kaena itu perlu penegasan penerapan filosofi keuangan islam dalam perbankan sehingga pihak mitra percaya dengan kredibilitas perbankan yang berdasarkan syariah dijalankan dengan semestinya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui kepatuhan dewan pengawas syariah ditinjau dari filosofi keuangan Islam pada lembaga keuangan syariah.
- b) Untuk mengetahui fungsi audit syariah ditinjau dari filosofi keuangan Islam pada lembaga keuangan syariah.
- c) Untuk mengetahui keterkaitan kepatuhan dewan pengawas syariah dan audit syariah ditinjau dari filosofi keuangan Islam pada lembaga keuangan syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a) Aspek teoretis

Penelitian ini diharapkan menjadi pendukung mengenai terbentuknya dewan pengawas syariah dan audit syariah yang lebih kompeten sebagaimana konsekuensi dari organ vital perbankan tersebut yang harus berlandaskan pada hukum dan aturan Allah swt. Untuk hal ini Arman (2013: 91) mengatakan bahwa kepatuhan syariah tidak lepas dari filosofi keuangan islam. Dimana filosofi

keuangan islam didasarkan pada adl dan hasan yang harus dimiliki oleh perusahaan dan membangun keberlangsungan perusahaan serta menjadi nilai plus bagi perusahaan. Perusahaan harus membangun teori ini dalam rangka membantu menciptakan pegawai yang berlandaskan pada syariah Islam sebagaimana visi-misi perusahaan.

Memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan melalui *shari'ate enterprise theory* yang diungkapkan oleh Triyuwono (2007: 3). *Shari'ate enterprise theory* mengandung nilai egoistik-altruistik, material-spiritual dan individu-jama'ah sehingga perusahaan tidak mementingkan dirinya sendiri. Karena di dalam perusahaan terdapat hak orang lain, untuk itu perusahaan perlu menerapkan hal ini untuk memikirkan kepentingan mitra perusahaan.

b) Aspek praktis

- i. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan masukan bagi perusahaan untuk menerapkan konsep kepatuhan dewan pengawas syariah dan audit syariah ditinjau dari filosofi keuangan islam. Acuan dan masukan ini dapat membantu perusahaan untuk lebih memperhatikan kinerja perbankan yang didukung oleh organ vitalnya yaitu DPS dan audit syariah. Dengan dukungan kedua bagian ini maka perusahaan akan memiliki struktur dan *schedule* yang kompeten serta memiliki kinerja pegawai yang optimal.
- ii. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendamping sekaligus masukan dalam hal pembuatan kebijakan pada perbankan terkhusus yang berkaitan dengan dewan pengawas syariah dan audit syariah.

c) Manfaat Regulasi

Secara regulasi penelitian ini diharapkan menjadi perhatian para DSN sebagai pengawas DPS dan tim audit syariah dan perhatian terhadap perusahaan agar lebih meningkatkan kinerja perbankan melalui dua organ yang vital ini.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Shari'ate Enterprise Theory

Shari'ate enterprise theory adalah pengembangan dari *enterprise theory* yang didalamnya sudah terdapat nilai-nilai keIslaman. Awalnya, *enterprise theory* hanya melingkupi aspek sosial dan pertanggung-jawaban (Triyuwono (2003: 83). Namun demikian, *enterprise theory* melakukan pengembangan agar memiliki bentuk yang lebih dekat lagi dengan syari'ah. Pengembangan dilakukan sedemikian rupa, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori dikenal dengan istilah *Shari'ah Enterprise Theory* (SET) (Triyuwono (Triyuwono 2007: 3).

Journal of Islamic economics, Triyuwono (Harahap (2003: 84) mengungkapkan bahwa *Enterprise theory* menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan saja pemilik perusahaan, tetapi juga masyarakat. Ditambahkan lagi oleh Triyuwono (2007: 84) dalam Jurnal symposium nasional akuntansi bahwa akuntansi syari'ah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stakeholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. Tetapi SET, yang dibangun berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat, lebih menghendaki keseimbangan antara sifat egoistik dan altruistik dibanding dengan ET. Sementara ET lebih mengedepankan sifat egoistiknya daripada sifat altruistik (Triyuwono (2007: 2).

SET memiliki cakupan akuntabilitas yang lebih luas dibandingkan dengan ET. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam (Triyuwono (Triyuwono (2007: 2). Ditambahkan lagi oleh Triyuwono

(2007: 3) bahwa SET yang dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. SET menyeimbangkan nilai egoistik (maskulin) dengan nilai altruistik (feminin), nilai materi (maskulin) dengan nilai spiritual (feminin), dan seterusnya. Penyatuan nilai-nilai tersebut memberikan kesadaran terhadap manusia akan kewajibannya tinggal dan hidup di dunia bahwa manusia melaksanakan yang diperintahkan oleh syariah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Peran SET yang mengedepankan kesadaran akan ketuhanan akan memunculkan situasi dimana manusia sebagai pengolah alam akan selalu tersadarkan bahwa manusia dalam segala aktifitasnya wajib mematuhi aturan syariah yang telah tercantum dalam Alqur'an dan Sunnah. Tidak hanya itu pengembangan teori ini merupakan hal yang penting karena mengembalikan jati diri akuntansi sebagai proses pencatatan sebagaimana yang dilakukan pada masa Rasulullah saw. Di tempatkannya Tuhan *stakeholder* yang tertinggi merupakan cara paling tepat karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian manusia yang disebut sebagai pengemban amanah dan menjadi pelaksana yang terpercaya, manusia sebagai *stakeholder* bagi perusahaan dibagi menjadi dua yaitu *stakeholder* langsung yaitu manusia yang secara langsung bersentuhan dengan proses perencanaan dan penggunaan produk atau disebut dengan penggagas, *stakeholder* tidak langsung adalah masyarakat luas yang memiliki andil yang besar terhadap jalannya sebuah bisnis. Kemudian yang paling penting dan terakhir sebagai *stakeholder* adalah alam yang terkadang manusia-manusia lalai dalam

menjaganya padahal memberikan kontribusi yang besar terhadap jalannya perusahaan.

Dengan menempatkan Tuhan sebagai bagian utama dari manusia dan tidak melupakan alam maka akan jelas bahwa bentuk pertanggungjawaban perbankan syariah akan sangat berbeda dengan perbankan yang berjalan dengan aturan konvensional. Perbankan yang peduli terhadap pentingnya kehadiran ketiga *stakeholder* tersebut akan menimbulkan dampak yang berbeda yaitu aturan syariah. Jika dikaitkan dengan kepatuhan dewan pengawas syariah dan fungsi audit syariah dikaji melalui filosofi keuangan Islam adalah bahwa kepatuhan yang berlandaskan pada syariah yang dilaksanakan oleh dewan pengawas syariah dan menjadi patokan oleh perbankan sangatlah penting karena dewan pengawas syariah sebagai rambu lalu lintas bagi perbankan syariah. Tugasnya untuk menjaga kredibilitas perbankan sehingga para nasabah dapat mempercayakan dana yang telah disimpan untuk dikelola oleh perbankan syariah. Dalam hal ini, sebagaimana latarbelakang perbankan yang didasarkan pada syariah maka perusahaan harus memiliki aturan sesuai dengan syariah. Aturan ini menghadirkan Sang Pemilik Semesta dalam kegiatannya setiap saat. Maksudnya adalah kegiatan yang bertentangan dengan aturan syariah atau islam harus ditiadakan. Dengan kata lain, SET yang menempatkan Tuhan sebagai *stakeholders* tertinggi dalam perusahaan sudah dijalankan dengan semestinya.

SET sangat peduli terhadap *stakeholder* yang lain yaitu nasabah. Nasabah yang mempercayakan dananya kepada pihak bank baik dalam bentuk tabungan atau bentuk investasi untuk dikelola oleh pihak perbankan. Dalam bentuk

investasi, nasabah merupakan pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Hal ini membantu keberlangsungan perbankan dan membuat perbankan tetap hidup ditengah persaingan bisnis.

Stakeholder terakhir yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya (Triyuwono (2007: 4).

B. *Filosofi Keuangan Islam Menurut Saleh MD. Arman*

Menurut Arman (2013: 91) dalam *OMAN chapter, to comply with the Shariah rules and regulations, Islamic Financial Institutions have formed Shariah Supervisory Board (SSB). The duty of SSB is to monitor and regulate the ongoing activities of Islamic Financial. Institutions in accordance with the Islamic laws and jurisdictions.*

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa dewan pengawas syariah yang berfungsi memantau dan mengatur kegiatan yang sedang berlangsung pada Lembaga Keuangan Islam harus sesuai dengan hukum dan yurisdiksi Islam. Salah

satu yurisdiksi Islam yang harus dilakukan adalah sesuai dengan filosofi keuangan Islam. Filosofi keuangan memuat dua hal yaitu Adil dan Ihsan (Arman (2013: 92):

1. Adil

Adil diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak dengan kata lain berlaku adil adalah menegakkan yang haq dan berpegang pada kebenaran. Berlaku adil merupakan kewajiban dalam Islam secara mutlak diperintahkan tanpa bisa ditawar-tawar lagi. Keadilan merupakan dasar dalam berinteraksi dengan Allah SWT dengan orang lain dan diri sendiri.

Adil berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Meminimumkan biaya produksi dan menggunakan sumber daya alam secara maksimal merupakan bagian dari adil karena hal tersebut adalah sikap yang tidak berlebih-lebihan. Sikap adil sangat diperlukan dalam setiap tindakan termasuk dalam tindakan berekonomi dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar.

Konsekuensi sebagai perbankan yang berbasis syariah mewajibkan segala transaksi dalam aturan syariah. Salah satu larangan dalam transaksi berbasis syariah adalah tidak menggunakan aturan riba, dimana aturan riba hanya ada pada perbankan konvensional. Riba merupakan tambahan atas piutang suatu penjualan. Riba dilarang karena menimbulkan ketidakadilan. Dengan menjauhi transaksi yang berdasarkan pada riba, perbankan syariah diharapkan menjadi perbankan yang bersikap adil dengan menempatkan segala hal sesuai proporsinya.

2. Ihsan

Ihsan yaitu seorang manusia menyembah Rabbnya dengan ibadah yang dipenuhi rasa harap dan keinginan, seolah-olah dia melihat-Nya sehingga diapun sangat ingin sampai kepada-Nya, dan ini adalah derajat ihsan yang paling sempurna. Tapi bila dia tidak bisa mencapai kondisi semacam ini maka hendaknya dia berada di derajat kedua yaitu: menyembah kepada Allah dengan ibadah yang dipenuhi rasa takut dan cemas dari tertimpa siksa-Nya.

Ihsan dalam syariah berfungsi sebagai alat control dan evaluasi terhadap bentuk-bentuk kegiatan ibadah, sehingga aktivitas manusia akan lebih terarah dan maju. Fungsi tersebut selaras dengan definisinya sendiri yaitu, ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, apabila engkau tidak mampu melihat-Nya maka sesungguhnya Allah melihat (mengontrol) engkau. Karena itu, Ihsan mencegah dari sifat penipuan atau kecurangan. Dimana dalam pengelolaan operasional perbankan, dengan menggolongkan resiko akan mengurangi kecurangan yang merugikan. Selain hal itu, bisa dilakukan dengan pemberian insentif yang akan menurunkan angka kelalaian dan pailit.

Sifat ihsan juga memiliki makna berbuat baik dan menyebarkan kebaikan. Sifat ini lahir karena pelakunya menyadari bahwa perbuatan itu baik dan diperintahkan agama untuk dilakukan. Dalam hal ini, lahirnya sifat ihsan sangat didukung oleh pengetahuan seseorang tentang kebaikan. Dalam aturan syariah dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama, dikhususkan berbuat baik bagi orang-orang yang kurang mampu. Sifat ihsan terlihat pada peredaran kekayaan

menimbulkan kesejahteraan bersama dengan melakukan distribusi yang sesuai dan berdampak pada mengurangi kemiskinan.

Ihsan lebih tinggi dari berlaku adil. Seseorang disebut adil apabila melaksanakan kewajibannya, lalu ia menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan ihsan adalah melakukan pekerjaan melebihi dari yang diwajibkan dengan tidak melanggar aturan dan mengambil atau menerima hak kurang dari yang telah ditentukan. Jadi, orang yang ihsan tidak pernah mengambil hak orang lain. Ia bahkan masih menyisakan haknya demi kemaslahatan orang lain.

Perbankan syariah yang menjadikan nasabah sebagai mitra harus memiliki sikap adil dan ihsan. Sikap adil yang dilakukan perbankan adalah memberikan pelayanan terbaik dan tidak melakukan aktifitas transaksi yang menggunakan aturan riba. Karena riba bukanlah bagian dari prinsip syariah. Bersikap ihsan dengan menghadirkan Allah di setiap aktifitasnya karena merasa bahwa selalu diawasi oleh Sang Pencipta.

Dewan pengawas syariah dan audit syariah untuk mewujudkan tujuan syariah tersebut perlu mengoptimalkan fungsinya dalam perbankan syariah. Karena konsekuensi dari perbankan syariah adalah memberikan kesejahteraan. Hal tersebut merupakan hak dari pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam perbankan (*indirect stakeholder*).

C. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah merupakan profesi yang lahir dan besar dari tuntutan publik akan adanya suatu jaminan akan penerapan konsistensi dan

loyalitas dalam syariat islam. Jasa profesional dari DPS merupakan kewajiban yang harus diemban olehnya sebagai pihak yang disertai tanggung jawab untuk membuat pelaporan dan verifikasi yang mana nantinya output yang telah dihasilkannya tidak hanya digunakan oleh klien (pihak bank ybs), namun juga oleh pihak ketiga atau public (investor/pemegang saham, kreditor, pemerintah, masyarakat dll). Khususnya dalam hal pengendalian dan pengambilan keputusan *decision making*. Oleh karenanya, posisi DPS adalah sangat vital karena meski mereka bekerja selayaknya auditor untuk kepentingan klien (bank) dan juga untuk kepentingan pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan. Setiap pernyataan yang dikeluarkannya atau setiap apa yang difatwakan/diputuskan adalah menyangkut sesuatu yang sangat prinsipil karena terkait dengan aqidah dan keyakinan dari orang-orang yang berada dalam lingkup kerjasama dengan organisasi yang menaungi mereka dan pihak ketiga (bank) (Widyanto (2010: 1580).

Dewan pengawas syariah (DPS) merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal syariah di bank syariah. Beberapa negara menyebut DPS sebagai shari'a supervisory board (SSB), atau shari'a committee, atau shari'a council. Faozan (Arifin (2013: 6) dalam jurnal ekonomi Islam, pengertian DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank syariah.

Pengertian DPS menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dalam Governance Standard for Islamic Financial Institutions (GSIFI) nomor 1 paragraf 2 dinyatakan bahwa:

“A shari’a supervisory board is a independent body of specialized jurists in fiqh mu’amalat (Islamic commercial jurisprudence). However, the Shari’a supervisory board may include a member other than those specialized in fiqh mua’alat, but who should be an expert in the field of Islamic Financial institutions and with knowledge of fiqh mua’alat...”.

Artinya:

“Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen yang mempunyai spesialisasi keahlian dalam fikih muamalah (hukum keuangan Islam). Namun demikian, anggota Dewan Pengawas Syariah tidak hanya (dituntut) mempunyai spesialis dalam fikih muamalah, tetapi juga harus ahli dalam dalam bidang lembaga keuangan Islam dan mempunyai pengetahuan tentang fikih muamalah.”

Pendapat lain diungkapkan dalam jurnal ekonomi islam oleh Faozan (Muhammad (2010: 3), Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum, jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 3 (tiga) orang. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS. (PBI No. 11/23/PBI/2009 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pasal 28 dan pasal 30)

DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank syariah. Anggota DPS terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga mengetahui pengetahuan umum di bidang perbankan. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utamanya adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan

syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN (Faozan (Arifin (2010: 9).

Dewan pengawas syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat (Fiqh Al-Muamalat). Namun DPS bisa juga anggota di luar ahli fiqh tetapi ahli juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat. Dewan pengawas syariah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, meriview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam (Masliana (Harahap (2011: 15).

Dewan pengawas syariah lahir dari dewan syariah nasional (DSN), tugas utama Dewan Syariah Nasional mengacu pada Keputusan DSN No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional MUI, antara lain meliputi: (1) menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya; (2) mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan usaha; (3) mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan (4) mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

DSN memiliki sifat yang menyeluruh dalam artian pengawasan yang dilakukannya bersifat nasional. Sedangkan dalam prakteknya pengawasan yang bersifat lebih lokal pada bank syariah secara langsung perlu dilakukan. Untuk mengawasi bank syariah secara lebih langsung, maka kepanjangan tangan DSN berupa Dewan Pengawas Syariah (DPS) pun dibentuk. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah antara lain didasari pada kesadaran akan pentingnya menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai

syariah. Selain itu, pengawasan yang lebih melekat dinilai perlu dilakukan sehingga kinerja bank syariah dapat terus dipantau agar sesuai dengan fatwa DSN. Dalam kerangka inilah, maka dibentuk Dewan Pengawas Syaiah sesuai ketentuan penjelasan UU No.10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf m.

Dalam ketentuan penjelasan tersebut diatur bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terkait bank syariah antara lain memuat (a) kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah; (b) pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah; dan (c) persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan demikian, keberadaan Dewan Pengawas Syariah mendapatkan legalitas yang kuat dalam sistem perundangan di Indonesia. Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugasnya mengawasi bank syariah dengan sejumlah ketentuan, diantaranya wajib mengikuti fatwa dari DSN dan statusnya sebagai dewan yang ditempatkan di bank syariah yang keanggotaannya ditetapkan berdasarkan rekomendasi DSN yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Selain itu, keanggotaan Dewan Pengawas Syariah juga harus mendapat persetujuan BI (Minarni (2013: 33)).

DPS wajib mengacu pada fatwa-fatwa DSN dalam melaksanakan tugasnya. Sejak awal bank syariah harus menyertakan calon anggota DPSnya untuk dimintakan rekomendasi dari DSN dan selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia. Sebagai pengawas syariah, fungsi DPS sangat strategis dan mulia, karena menyangkut kepentingan seluruh pengguna lembaga

tersebut. Umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan DPS karena dari sinilah kepercayaan pada bank syariah tersebut ditumbuhkan (Faozan (2013: 10).

Dewan pengawas syariah adalah lembaga independen yang mempunyai spesialisasi keahlian dan fikih muamalah (hukum keuangan Islam). Dewan pengawas syariah (DPS) dalam melaksanakan tugasnya bersandarkan pada kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah. (Tanya Jawab Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 *Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.*)

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. (Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2011).

Dewan pengawas syariah melaksanakan tugasnya berdasarkan kepatuhan syariah yang fatwa-fatwanya diberikan dari DSN (Dewan syariah Nasional), dimana kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Secara

tegas dinyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah *raison detre* bagi institusi tersebut. (Point 1 Islamic Financial Services Board).

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah, yaitu segala ketentuan yang mengacu dan berdasarkan pada hukum islam. (Burhanuddin (Ilhami, 2009: 479) Dalam hukum Islam, sumber hukum yang utama adalah Alqur'an dan Sunnah. (Daud Ali, (Ilhami, 2009: 479) Prinsip-prinsip syariah merupakan segala ketentuan yang berlandaskan pada sumber hukum tersebut. Untuk dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar sehingga dapat diterapkan secara lebih pragmatis, dilakukan perumusan aturan teknis, termasuk di dalamnya aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang dalam suatu sistem hukum negara tertentu ke dalam bentuk bentuk peraturan hukum yang bersifat amaliah. (Burhanuddin (Ilhami, 2009: 479). Dari aturan inilah kemudian prinsip syariah, khususnya dalam sistem hukum perbankan syariah berasal.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa prinsip syariah sebagai prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Definisi ini lebih memperjelas bentuk dan sumber prinsip syariah, yaitu berbentuk fatwa yang bersumber dari lembaga berwenang. Penentuan lembaga berwenang juga ditegaskan yaitu Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI). (Pasal 26 angka (2) undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)

Dewan pengawas syariah ahli dalam hukum-hukum Islam dan berfungsi untuk memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk bank syariah kemudian bersama dengan dewan komisaris mengawasi pelaksanaannya (Widyanto (Muhammad (2010: 1580). Intinya, tugas utama dari dewan pengawas syariah ini adalah mengawasi pelaksanaan operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari aturan syariah (Widyanto (Antonio (2010: 1580).

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 11/23/PBI/2009 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pasal 29 DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya. Sedangkan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

- a. Mengawasi proses pembangunan produk baru BPRS;
- b. Melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan
- c. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Langkah–langkah pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya oleh DPS BPRS, dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/ 22 /DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dijelaskan sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS;
3. Melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS;
4. Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah;
5. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen;
6. Meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS;
7. Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS; dan perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan;
8. Melakukan pembahasan dengan BPRS mengenai hasil temuan pengawasan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat;

9. Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas kegiatan usaha BPRS; dan
10. Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, termasuk dalam pembahasan exit meeting hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

DPS yang telah terpilih oleh lembaga kemudian akan diuji di DSN (dewan syariah nasional). Setelah terpilih DPS menjalankan aktifitasnya. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Peranan DPS sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah.

Bank yang akan membentuk DPS dalam rangka perubahan kegiatan usaha atau membuka kantor cabang syariah untuk pertama kalinya dapat menyampaikan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Secara singkat dapat dikatakan bahwa mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah, setidaknya setiap enam bulan sekali dewan pengawas syariah menganalisa operasional Bank Syariah dan menilai kegiatan maupun produk bank tersebut yang pada akhirnya dewan pengawas syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional Bank Syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional kemudian menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan Bank Indonesia.

D. Audit dalam Pandangan Syariah

Landasan atas pentingnya audit syariah, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al Hujurat/6: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا
نَادِمِينَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang yang fasik kepadamu membawa berita, maka tangguhkanlah (hingga kamu mengetahui kebenarannya) agar tidak menyebabkan kaum berada dalam kebodohan (kehancuran) sehingga kamu menyesal terhadap apa yang kamu lakukan.”

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang mengambil informasi maka ia harus memeriksa secara teliti terlebih dahulu sebelum diambil suatu keputusan karena bisa saja terjadi musibah jika tidak teliti terlebih dahulu. Audit syariah bertugas dalam memeriksa laporan keuangan dan informasi keuangan yang lain karena dapat mendatangkan malapetaka yang besar sehingga menimbulkan krisis dan musibah. Oleh karena itu, audit syariah harus dilakukan secara optimal.

Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktifitas bank syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah (Minarni (2013: 33).

Menurut Bank Negeri Malaysia, audit syariah adalah penilaian independen secara periodik dan penjaminan yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan menambahkan derajat kesesuaian pada operasi lembaga keuangan islam, dengan tujuan memastikan sistem kontrol internet yang ada sesuai dengan asas syariah. Audit Syariah dilakukan oleh departemen independen yang menjadi bagian dari audit internal dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi pada suatu institusi dan melihat kesesuaiannya dengan aturan syariah, fatwa, dan ketentuan lainnya yang diterbitkan oleh IFI dan Syariah Supervisor Board (AAOIFI Governance Standard (GSIFI) 3).

Kebutuhan atas kepastian pemenuhan syariah ini mendorong munculnya fungsi audit baru, yaitu audit syariah. Dalam hal ini, auditor syariah memegang peran krusial untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuhan aspek syariah. Sehingga stakeholder merasa aman berinvestasi dan dana yang dimiliki oleh LKS dapat dipastikan telah dikelola dengan baik dan benar sesuai syariat Islam (Mardiyah dan Mardiah, 2015 : 3).

Fungsi audit syariah adalah sebagai sebuah sistem yang memeriksa kepatuhan operasi-operasi keuangan syariah berdasarkan hukum syariah (mardiyah dan Mardiah (Shafeek, 2015).

Menurut Harahap (2002:160), menjelaskan tujuan audit syariah adalah:

Tujuan audit adalah agar auditor mampu menyatakan suatu pendapat apakah laporan keuangan yang disusun oleh lembaga itu, dari semua aspek yang bersifat material, "*true and fair*" atau benar dan wajar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, standar akuntansi IIAOFI, serta standar dan praktek akuntansi nasional yang berlaku di negara itu. Pendapat audit tidak memberikan keyakinan yang menyangkut kesehatan suatu lembaga dimasa yang akan datang dan juga tidak menilai efisiensi atau efektivitas pelaksanaan tugas manajemen.

Minarni (Antonio (2013: 34) menyatakan tentang hal-hal yang dilakukan audit bank syariah meliputi:

- a. Pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah,
- b. Memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan,
- c. Pemeriksaan distribusi profit,
- d. Pengakuan pendapatan *cash basis* secara riil,
- e. Pengakuan beban secara *accrual basis*,
- f. Dalam hubungan dengan bank koresponden depositori, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil,
- g. Pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat,
- h. Ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.

Poin diatas merupakan poin yang diwajibkan ada dalam audit syariah, tetapi menurut Minarni (Jusup (2013: 34), meskipun demikian prosedur audit yang telah ada tetap memiliki peran dalam audit pada perbankan syariah. Prosedur audit secara umum antara lain:

- a. Prosedur analitis/mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan
- b. Menginspeksi/pemeriksaan dokumen, catatan dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber berwujud

- c. Mengkonfirmasi/pengajuan pertanyaan pada pihak intern atau eksteren untuk mendapatkan informasi
- d. Menghitung dan menelusur dokumen
- e. Mencocokkan ke dokumen

AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengeluarkan dan mensahkan standar audit yang berlaku pada lembaga keuangan syariah termasuk bank yang kemudian banyak diacu diberbagai negara. Standar Auditing AAOIFI untuk audit pada lembaga keuangan sendiri mencakup lima standar, yaitu tujuan dan prinsip (*Objective and Principles of Auditing*), laporan auditor (*Auditor's Report*), ketentuan keterlibatan audit (*Terms of Audit Engagement*), lembaga pengawas syariah (*Shari'ah Supervisory Board*), tinjauan syariah (*Shari'ah Review*), (Karim (1999: 239-241).

Ditambahkan oleh Kasim et. al (2013: 23) dalam *IOSR journal of business and management* bahwa *In the case of reviewing the interim and annual accounts and financial reports (inclusive of matters arising from the audit), the committee should review all the mentioned reports to ensure its completeness, fairness and accuracy. The committee must also review those reports (interim and annual accounts and financial reports) before their submission to the IFIs' board of directors. The specific responsibilities associated with this function include:*

- a. *Ensuring compliance with the Shari'ah, legal as well as regulatory requirements*
- b. *Reviewing the treatment of significant areas of judgment, accounting estimates*

c. Reviewing significant adjustment arising from the audit

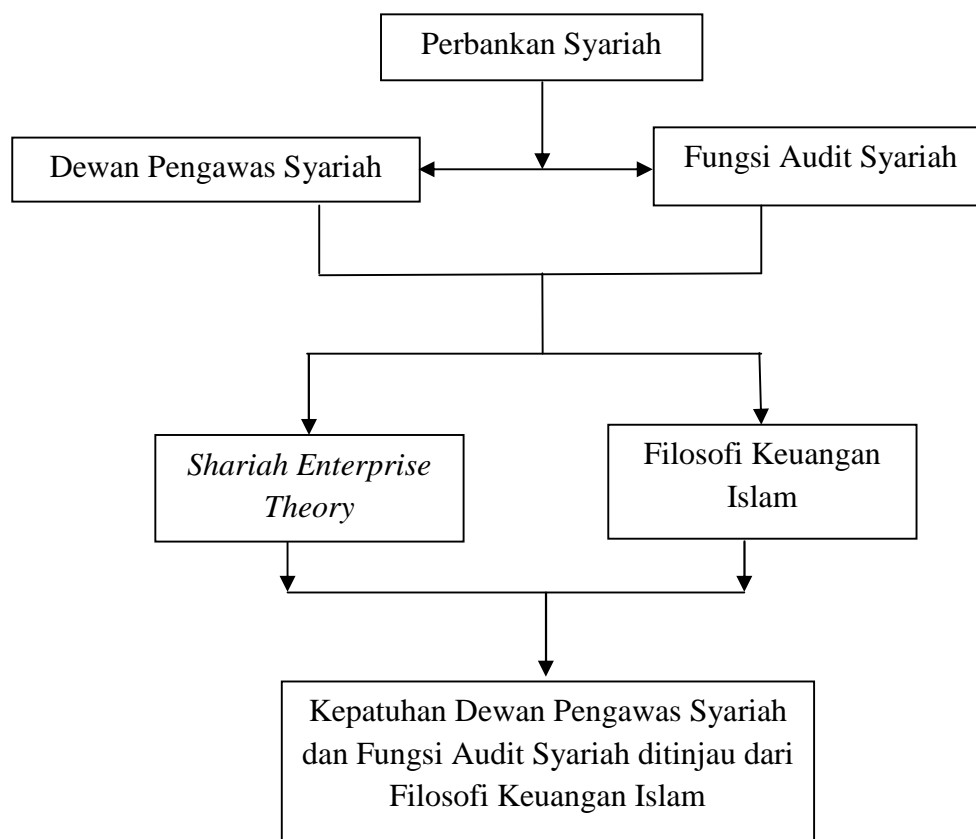
d. Presenting balanced and comprehensible assessment of the company's position that relates to the responsibilities of the audit

Maksud dari pernyataan diatas adalah audit syariah memiliki tanggungjawab dalam mengemban tugasnya, salah satunya adalah dengan mengarahkan perbankan syariah pada kepatuhan syariah beserta hal-hal yang harus dilakukan seorang audit dalam mengemban tanggungjawabnya sebagai seorang auditor.

E. Kerangka Teoretis

Penelitian ini akan meneliti tentang kepatuhan dewan pengawas syariah dan fungsi audit syariah ditinjau dari filosofi keuangan islam. Ada dua variabel yang diuji dalam penelitian ini, yaitu: kepatuhan dewan pengawas syariah dan fungsi audit syariah ditinjau dari filosofi keuangan Islam (variabel independen) dan perbankan syariah (variabel dependen). Model penelitian yang menunjukkan hubungan tersebut disajikan dalam bentuk diagram berikut ini.

Gambar. 1



Dewan pengawas syariah dan fungsi audit merupakan dua organ vital dalam perbankan syariah. Kepercayaan nasabah serta investasi yang dilakukan investor sangat bergantung pada dua organ vital ini. Karena setiap informasi yang akan diberikan kepada pihak nasabah atau pihak yang berhak mendapatkan kesejahteraan harus mengetahui sejauh mana tingkat keamanan dan pengembalian yang akan ia peroleh. Untuk mengambil alih perhatian dari pihak nasabah dan pihak investor maka diperlukan nilai plus dari suatu perbankan, dengan mensandarkan kepatuhan DPS dan fungsi audit syariah pada filosofi keuangan islam.

Mengkombinasikan kepatuhan DPS dan fungsi audit akan membawa angin segar baru dalam perbankan dan membawa perbankan pada tingkat kepercayaan nasabah yang lebih sehingga ini menjadi daya tarik pada nasabah dan investor. Hal ini membuka jalan untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan investor terhadap pelayanan perbankan syariah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini diarahkan ke dalam jenis metode penelitian kualitatif. Menurut Sula *et. al* (Sawarjuwono (2010: 8) menjelaskan penelitian yang mengangkat masalah realita sosial sangat dipengaruhi oleh konsepsi para pelaku dan secara epistemology, ia ingin menjelaskan secara holistik semua faktor yang berpengaruh terhadap masalah yang diangkat, maka ia akan memilih metodologi yang tergolong *naturalistic* atau kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sulselbar Syariah. Banyak masyarakat yang tertarik untuk memberikan kepercayaan kepada perbankan ini, menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Selain itu, dengan adanya keterikatan secara religi dan pengalaman beragama menyebabkan semua pihak, termasuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Auditor Bank Syariah (Internal) yang terlibat pada bank Islam tersebut berusaha sebaik-baiknya untuk memperoleh berkah dari Allah swt. Dengan berdasar pada kepercayaan masyarakat dan pengembangan perbankan yang cepat.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan interpretif, hal ini dikarenakan: 1) pemahaman muncul melalui mencari penjelasan dari peristiwa yang didasarkan pada interaksi secara langsung kepada informan, 2) bagaimana informan memberikan informasi dengan pengalaman dilapangan, 3) memahami tugas DPS dan audit syariah secara detail dengan langsung mengobservasi. Selain itu pendekatan interpretif memperbolehkan peneliti untuk terlibat secara subjektif dengan partisipan penelitian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Chariri (2009: 5) bahwa pendekatan interpretif berasal dari filsafat Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman di dalam ilmu sosial. Pendekatan ini memfokuskan pada sifat subjektif dari *social world* dan berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya.

C. Jenis dan Sumber Data

Peneliti dalam hal ini menggunakan jenis data subyek dan fisik. Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Sedangkan data fisik merupakan jenis data penelitian yang berupa obyek atau benda-benda fisik, antara lain dalam bentuk: bangunan atau bagian dari bangunan, pakaian, buku dan senjata. Data fisik merupakan benda berwujud yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian pada masa lalu (Indriantoro dan Supomo, 2014: 35).

Sumber data penelitian yang dilakukan tidak kalah penting karena menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) (Indriantoro dan Supomo, 2014: 36). Data primer diperoleh melalui interview atau wawancara, untuk memperoleh informasi yang detail dari narasumber yang kompeten terhadap permasalahan yang dibahas oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk diskusi.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), (Indriantoro dan Supomo, 2014: 37). Data sekunder diperoleh melalui sumber kepustakaan atau studi pustaka yang didapatkan melalui perantara seperti buku, jurnal, artikel, internet, makalah dan literatur lainnya.

Penentuan sumber data dalam penelitian kualitatif menggunakan nonprobability sampling dengan metode purposive sampling. Sebagaimana definisi berikut:

Non probability sampling adalah teknik pengambilan informan yang tidak memberi kesempatan yang sama bagi setiap unsur untuk dipilih menjadi informan. Metode *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010: 218).

Dalam penelitian ini, sumber data dengan menggunakan individu berasal dari pegawai yang menjadi dewan pengawas syariah dan audit syariah dan ahli fiqh tentang dewan pengawas syariah dan audit syariah. Dengan menggunakan individu-individu tersebut, maka penelitian ini akan mudah diselesaikan karena peneliti bertemu langsung dengan individu yang menangani pengawasan kebijakan dan ahli pada bidangnya. Atas pertimbangan ini, peneliti akan menggunakan sumber data di atas. Informan merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian. Mereka tidak hanya sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapi telah menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan. Informan yang digunakan sebanyak tiga orang jika dalam penelusuran informasi masih dirasa kurang atau belum memadai maka dilakukan penambahan informan. Informan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Dewan pengawas syariah
2. Audit syariah
3. Kepala keuangan
4. Customer service
5. Nasabah

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode survei

Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subyek (responden) penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan kata lain, metode survei merupakan metode pengumpulan data primer berdasarkan komunikasi antara peneliti dengan responden.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara atau lebih spesifiknya wawancara tatap muka. Wawancara tatap muka dilakukan agar dapat memperoleh informasi secara langsung dari responden. Seperti yang diungkapkan oleh Indriantoro dan Supomo (2014: 40) bahwa teknik wawancara tatap muka mempunyai kelebihan dibandingkan wawancara melalui telepon dan teknik kuesioner. Teknik ini memungkinkan untuk mengajukan banyak pertanyaan dan yang memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan wawancara melalui telepon. Teknik ini memungkinkan bagi pewawancara untuk memahami kompleksitas masalah dan menjelaskan maksud penelitian kepada responden. Partisipasi responden penelitian relatif lebih tinggi dibandingkan dengan teknik kuesioner.

2. Metode observasi

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014: 36), metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian

yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku (subyek), benda atau kejadian (obyek) dibandingkan dengan metode survei.

Teknik pengumpulan data dalam metode ini adalah observasi langsung, dimana penggunaan teknik observasi langsung memungkinkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara detail. Data yang diperoleh melalui observasi langsung kadang digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara atau kuesioner. Metode observasi pada penelitian terhadap perilaku lebih menekankan pada respon subyek secara nonverbal dibandingkan dengan metode survei yang lebih menekankan pada respon subyek secara verbal. Respon nonverbal atau perilaku ekspresi yang umumnya digunakan dalam komunikasi, antara lain: mengangguk, tersenyum, atau mengernyitkan alis mata, dan ekspresi wajah yang lain atau bahasa tubuh (isyarat).

Selain itu, peneliti menggunakan sumber dokumentasi dengan melakukan penelaahan dokumen yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek dan masalah penelitian, diantaranya data kepatuhan dewan pengawas syariah dan fungsi audit syariah ditinjau dari filosofi keuangan Islam pada lembaga keuangan syariah sebelumnya, laporan keuangan serta data yang diperoleh dari literatur-literatur dan instansi yang terkait dengan penelitian.

E. Instrument Penelitian

Instrument atau alat penelitian dalam metode penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti harus memahami bagaimana metode penelitian kualitatif, mempunyai wawasan pada bidang yang diteliti serta siap untuk memasuki objek penelitian dan harus memiliki kesiapan secara logistik dan akademik. Sebagai instrument peneliti juga harus ‘divalidasi’ seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Beberapa alat yang digunakan dalam memperoleh data yang diinginkan dan diharapkan ampu untuk membuktikan hasil penelitian, beberapa alat tersebut antara lain:

1. Perekam suara
2. *Handphone*
3. Kamera, dan
4. Alat tulis

F. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang diadopsi penulis dalam penelitian dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan menyajikan data yang diperoleh dari objek yang diteliti kemudian dianalisa berdasarkan kemampuan nalar sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek

yang diteliti. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1. Data reduction

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Pada tahap ini, data dari interview transcripts, field notes, observation dan lain-lain diseleksi dan diorganisir melalui coding/tulisan ringkas.

Transkrip hasil wawancara dapat dianalisis dan kata kuncinya dapat ditandai untuk memudahkan coding dan pengklasifikasian. Mereduksi data-data yang didapat dilakukan dengan mengedit serta menyusun data hasil wawancara, catatan tertulis, juga hasil angket terbuka. Setelah itu peneliti akan memberikan kode pada setiap data atau informasi yang diperoleh.

Adapun pengkodean yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a) KKDPS: digunakan untuk data-data atau informasi yang berkenaan dengan konsep kepatuhan dewan pengawas syariah ditinjau dari filosofi keuangan Islam pada perusahaan yang sesuai dengan fiqih.

- b) KFAS: digunakan untuk data-data atau informasi yang berkenaan dengan konsep fungsi audit syariah ditinjau dari filosofi keuangan Islam pada perusahaan yang sesuai dengan fiqih.
- c) PKDPS: digunakan untuk data-data atau informasi yang berkenaan dengan praktek kepatuhan dewan pengawas syariah ditinjau dari filosofi keuangan Islam pada perusahaan secara riil di lapangan.
- d) PFAS: digunakan untuk data-data atau informasi yang berkenaan dengan praktek kepatuhan dewan pengawas syariah ditinjau dari filosofi keuangan Islam pada perusahaan secara riil di lapangan.

2. Data display

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplay-kan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja yang selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Conclusion drawing/verification

Langkah ketiga, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam mengolah dan menganalisis data:

- a) Peneliti melakukan seleksi data dengan cara menyusun kembali hasil wawancara.
- b) Hasil wawancara dicek terlebih dahulu kebenaran datangnya dengan cara mengkonfirmasi/memperlihatkan kembali hasil wawancara kepada informan penelitian. Apabila ada perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan informasi, maka peneliti dan subjek penelitian memberikan paraf dan tanggal pengeditan hasil wawancara.
- c) Jika penyusunan hasil wawancara tidak ada perubahan setelah diperlihatkan kembali pada subjek penelitian, maka hanya subjek penelitian saja yang memberikan paraf dan tanggal wawancara.
- d) Pengkodean.
- e) Setelah pengkodean, peneliti akan melakukan kategorisasi data hasil penelitian dalam dua kategori yakni konsep kepatuhan dewan pengawas syariah dan fungsi audit syariah ditinjau dari filosofi keuangan Islam dan perlakuan kepatuhan dewan pengawas syariah dan fungsi audit syariah ditinjau dari filosofi keuangan Islam. Jika informasi yang didapat mengenai kepatuhan dewan pengawas syariah dan fungsi audit syariah ditinjau dari filosofi keuangan Islam dan perlakuan kepatuhan dewan pengawas syariah dan fungsi audit syariah ditinjau dari filosofi keuangan Islam maka peneliti akan memasukkannya ke dalam kolom konsep kepatuhan dewan pengawas syariah dan fungsi audit syariah ditinjau dari filosofi keuangan Islam dan perlakuan kepatuhan dewan pengawas syariah dan fungsi audit syariah ditinjau dari filosofi keuangan Islam dan sebaliknya.

- f) Setelah semua data masuk kategori, peneliti mencari kaitan kategori 1-2. Jika ada kaitan, buat kategori baru.

Peneliti melakukan penafsiran data terhadap semua data yang diperoleh dengan menggunakan kata-kata peneliti sendiri dengan dilandaskan pada teori yang mendukung.

G. Validitas dan Realibilitas Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas sering dinamakan Kredibilitas. Penelitian kualitatif memiliki dua kelemahan utama: (a) Peneliti tidak dapat 100% independen dan netral dari research setting; (b) Penelitian kualitatif sangat tidak terstruktur (*messy*) dan sangat *interpretive*. Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan data dilakukan dengan beberapa pendekatan. Beberapa pendekatan itu antara lain: *triangulation*, *disconfirming evidence*, *research reflexivity*, *member checking*, *prolonged engagement in the field*, *collaboration*, *the audit trail*, *thick and rich description* dan *peer debriefing* (Chariri (2009: 14).

Dari penjelasan diatas, pendekatan yang digunakan peneliti adalah dengan pendekatan triangulasi, sebagaimana menurut Mudjiarahardjo (2010: 1), triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang

handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Triangulasi terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.
2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian.

Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
4. Terakhir adalah triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki *expert judgement* ketika

membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.

Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi metode, triangulasi sumber data, dan triangulasi sumber teori. Triangulasi antar peneliti tidak digunakan karena dalam penelitian ini dilakukan secara individual.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Bank Sulsebar Syariah

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003

tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar.

Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005.

Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara circular resolution dan Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam Akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh Persetujuan Bank Indonesia

berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP. GBI/2011 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Disingkat PT. Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Disingkat PT. Bank Sulselbar (<http://banksulselbar.co.id/corporate-site/profil-perusahaan>).

Pada tahun 2007, PT. Bank Sulselbar telah membentuk Unit Usaha Syariah. Berkaitan dengan hal tersebut telah dibentuk Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulsel No. SK/029/DIR tanggal 26 April 2007 tentang pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulsel dan SK Direksi No. SK/034/DIR tanggal 11 Mei 2007 tentang Personalia Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulsel, telah ditunjuk personalia sebagai berikut :

1. Prof. DR. H. Halide = Ketua
2. DR. Mukhlis Sufri, SE, M.Si = Anggota

Bank Sulselbar Syariah merupakan Unit Usaha Syariah dari PT. Bank Sulsel. Unit ini mulai beroperasi pada bulan April 2007 dengan modal awal Rp.10.328.992.500.

Adapun strategi yang ditempuh guna pengembangan Unit Usaha Syariah ini antara lain :

1. Menyalurkan pembiayaan syariah secara intensif baik melalui pola *executing*, *channeling*, maupun aliansi dengan perbankan syariah yang ada kepada sektor konsumtif maupun produktif terutama dengan pola *mudharabah*.

2. Mengintensifkan penghimpun dana masyarakat berjangka panjang secara berimbang dengan penyaluran pembiayaan syariah yang diberikan.
3. Mengembangkan produk simpanan berjangka dengan pola Mudharabah yang mendukung penyediaan dana berjangka panjang.
4. Membuka akses layanan masyarakat yang lebih luas dengan office channeling, pembukaan kantor cabang syariah baru serta kerja sama ATM.
5. Melakukan sosialisasi dan promosi secara intensif kepada masyarakat baik melalui kerjasama dengan para ulama maupun media promosi dan sosialisasi lainnya.
6. Meningkatkan kepada sumber daya manusia dalam service excellent serta pemahaman konsep dan produk perbankan syariah.
7. Menerapkan Good Corporate Governance untuk menjaga citra perusahaan di masyarakat dan menciptakan perbankan yang sehat dan terpercaya.
8. Meningkatkan permodalan Unit Usaha Syariah melalui mekanisme internal maupun tambahan alokasi modal.

2. Visi dan Misi Bank Sulselbar

a) Visi

Menjadi bank yang terbaik di kawasan Indonesia Timur dengan dukungan manajemen dan sumber daya manusia yang profesional serta memberikan nilai tambah kepada Pemda dan masyarakat.

b) Misi

- i. Penggerak dan pendorong laju pembangunan ekonomi daerah.
- ii. Pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah.
- iii. Salah satu sumber pendapatan asli daerah.

B. Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah Ditinjau Dari Filosofi Keuangan Islam Pada Lembaga Keuangan Syariah

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum Syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal. Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Kedua sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain (Anggadini (2011:79).

Oleh karenanya diperlukan pengawasan yang melekat pada setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas perbankan berupa motivasi keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan. Di dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional Bank Islam tidak menyimpang dari tuntutan syariah Islam, maka di adakan “Dewan Pengawas Syariah” (Sumitro (2004: 51).

Menurut Sumitro (2004: 52), untuk menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, DPS mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1. DPS bukan staff bank, dalam arti mereka tidak tunduk dibawah kekuasaan administratif
2. Mereka dipilih oleh RUPS
3. Honorarium DPS ditentukan oleh RUPS
4. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya

Pengawasan DPS memiliki aturan sendiri. Pengawasan yang dilakukan harus sesuai dengan kepatuhan syariah karena kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. (Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, tanggal 12 Januari 2011). Di dalam aturan tersebut tertera prinsip syariah yang wajib dilaksanakan. Baik terkait dengan produk maupun kegiatan yang lain dalam perbankan syariah sebagaimana pendapat Bapak Mukhlis Sufri (Anggota DPS).

“Yang terkait dengan kepatuhan syariah contoh: produknya, misalnya ya apakah ketika menyalurkan, menerima, dan jasa, iya kan begitu ya, jangan sampai ada penyaluran pembiayaan tidak sesuai syariah hanya aqad-aqad dinilai ya jangan sampai tidak sesuai aqad itu dengan produk itu, bisa menimbulkan masalah.”

Akad yang berkaitan produk, bukan hanya memperhatikan akad yang sesuai dengan kepatuhan syariah tetapi mengawasi segala aktivitas yang berkaitan dengan akad, baik dari peluncuran produksampai penggunaan produk secara berlanjut. Hal ini merupakan penerapan prinsip syariah yang terdapat dalam kepatuhan syariah dari manifestasi filosofi keuangan islam yaitu bersifat ihsan. Ihsan atau selalu merasa diawasi oleh Allah swt dalam setiap aktivitasnya.

Menjaga kepercayaan nasabah merupakan kewajiban perbankan syariah dengan menjaga kepatuhan perbankan tetap pada koridor syariah sehingga pada produk yang diluncurkan perbankan, diperhatikan dengan baik mulai dari akad-akadnya sampai pada para nasabah menggunakan produk tersebut. Di sisi inilah pengawasan DPS berjalan, sebagaimana diketahui bahwa kepercayaan nasabah menjadi hal penting dalam perbankan sebab jika nasabah sudah tidak mempercayai perbankan syariah lagi maka perbankan akan pailit karena itu penting untuk menjaga segal aktivitas dan produk perbankan agar sesuai syariah.

DPS selain berkewajiban mengarahkan, meriview, dan mengawasi aktifitas lembaga keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah islam, DPS juga sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah (Agustianto (2010: 1). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Mukhlis Sufri (Anggota DPS).

“Sebetulnya memang substansi dari kepengawasan bagian di dalam menasehati jangan sampai dia terjebak keluar dari prinsip-prinsip Al Quran, prinsip-prinsip apa yang disyaratkan di dalam fatwa dewan syariah nasional.”

DPS memberikan nasehat atau sebagai tempat konsultasi bagi pimpinan perbankan dalam menjalankan operasional perbankan. Hal ini diungkapkan juga oleh Bapak Bahar (nasabah atau mitra).

”DPS perannya sebagai pengawas, maksudnya juga bersifat sebagai konsultan juga kan, konsultasi kan. Dia memberikan konsultasi, tempat konsultasi pihak Bank, dia juga sekaligus mengawasi alur-alur atau persyaratan syariahnya.”

DPS bukan hanya melaksanakan kewajiban sebagai pengawas tetapi adanya DPS merupakan tempat konsultasi perbankan dalam melaksanakan aktifitas operasional agar sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah menjadikan aturan syariah sebagai pedoman dalam menjalankan mekanisme operasional karena mengedepankan kesadaran akan ketuhanan.

Dewan pengawas syariah sebagai alat pengawasan pada perbankan memiliki aturan dalam menjalankan aktifitasnya. Menjalankan kegiatan pengawasan, yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan standar yang menjadi ukuran dan pola untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan produk yang dihasilkan. Standar itu harus jelas, wajar, dan obyektif. Standar pengawasan terkait produk dan ukuran tersebut telah tertera dalam fatwa yang menjadi rujukan DPS. Dewan pengawas syariah melaksanakan tugasnya berdasarkan kepatuhan syariah yang fatwa-fatwanya diberikan dari DSN (Dewan syariah Nasional), dimana kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Secara tegas dinyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah *raison detre* bagi institusi tersebut. (Point 1 Islamic Financial Services Board). Hal tersebut sesuai dengan petikan wawancara dengan Bapak Mukhlis Sufri (anggota DPS):

“Fatwa DSN itu menjadi rujukan kita karena disitulah dasar tingkat kesyariahannya. Fungsinya juga memberi pertimbangan secara syariah kepada direktur atau manajemen dimana dia posisinya sebagai dewan pengawas syariah. Memberi pertimbangan-pertimbangan secara syariah.”

DPS yang merupakan mediator antara pihak bank dan DSN. Karena semua produk perbankan syariah yang diluncurkan harus sesuai dengan fatwa DSN. Di dalam fatwa DSN sudah terdapat prinsip syariah yang harus dilaksanakan oleh pihak bank syariah. Dalam meluncurkan produk perbankan syariah bukan hanya produk yang menjadi konsentrasi prinsip syariah tetapi dari lingkungan juga, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mukhlis Sufri (Anggota DPS).

“Bukan hanya menjalankan operasional tetapi arah pengembangan lembaga itu harus dilihat, bukan hanya produknya tetapi iklim organisasi, iklim perbankan, iklim asuransi, iklim kelembagaan atau bisnis syariah itu sesuai dengan syariah atau tidak patuh terhadap syariah, bukan dari produknya tetapi dari lingkungannya yang dilihat,”

Jadi dalam fatwa yang dikeluarkan DSN memuat bukan hanya aturan tentang produk perbankan syariah tetapi memuat aturan mengenai lingkungannya yang harus sesuai syariah. Bisa dilihat bahwa perbankan syariah harus memperhatikan segala hal yang terkait dengannya, lingkungan yang menurut sebagian orang tidak penting maka dalam perbankan syariah lingkungan menjadi penting karena hal ini merupakan konsekuensi dari efek syariah yang timbul yang menjadikan Sang Pencipta segala sesuatu sebagai tujuan dan ridha segala aktifitas yang terlaksana.

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah, yaitu segala ketentuan yang mengacu dan berdasarkan pada hukum Islam. (Burhanuddin (Ilhami, 2009: 479) Dalam hukum

Islam, sumber hukum yang utama adalah Alqur'an dan Sunnah. (Daud Ali, (Ilhami, 2009: 479) Prinsip-prinsip syariah merupakan segala ketentuan yang berlandaskan pada sumber hukum tersebut. Untuk dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar sehingga dapat diterapkan secara lebih pragmatis, dilakukan perumusan aturan teknis, termasuk di dalamnya aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang dalam suatu sistem hukum negara tertentu ke dalam bentuk bentuk peraturan hukum yang bersifat amaliah. (Burhanuddin (Ilhami, 2009: 479). Dari aturan inilah kemudian prinsip syariah, khususnya dalam sistem hukum perbankan berasal.

Walaupun DPS merupakan lembaga independen dalam perbankan syariah bukan berarti DPS memiliki aturan sendiri tetapi setiap aktifitas yang dilakukan memiliki aturan yang ditetapkan oleh fatwa DSN. Fatwa DSN tidak lepas dari aturan syariah karena aturan syariah menjadi standar dalam aktifitas operasional perbankan syariah.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Peranan DPS sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah.

Dewan pengawas syariah wajib mengikuti segala kepatuhan syariah berdasar pada prinsip syariah yang sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dalam menjalankan tanggungjawab dewan pengawas syariah dan

tugasnya untuk menjaga kredibilitas perbankan berdasarkan prinsip syariah menghadirkan Sang Pemilik Semesta dalam kegiatannya setiap saat dengan menjalankan kewajiban seorang muslim. Hal ini tercantum dalam wawancara dengan Bapak Mukhlis SUfri (Anggota DPS) Bank Sulsebar Syariah: “Iya jelas dong, orang bicara syariah kok tidak shalat. Sedangkan ndak jadi dewan pengawas syariah harus shalat sebagai orang muslim”

Sebagai cerminan dari perbankan yang berdasarkan syariah maka patut dan wajib melaksanakan kewajiban seorang muslim. Disini terlihat proses pertanggungjawaban terhadap Tuhan, dimana perbankan mempunyai akuntabilitas tertinggi yaitu kepada Tuhan. Selain kewajiban setiap individu muslim, perbankan syariah juga tetap melaksanakan CSR yang merupakan kewajiban perbankan untuk dipenuhi, sebagaimana ungkapan Bapak Mukhis Sufri (Anggota DPS).

“Kalau perusahaan memang aturannya harus ada CSR, disini juga kalau bank syariah bukan hanya CSR, aspek-aspek yang berkaitan dengan dana kebajikan yah, misalnya itu, bank-bank syariah selama ini dia mengelola zakat.

Kewajiban perbankan syariah tidak menjalankan CSR saja tetapi mengeluarkan zakat, hal ini konsekuensi dari perbankan syariah yang dasarnya memiliki karakter metafora zakat, dimana menyatukan nilai materi dan spiritualitas. Selain berkarakter metafora zakat, perbankan syariah juga mengeluarkan dana kebajikan sebagai bagian dari sikap ihsan yaitu menyebarkan kebaikan. Diungkapkan oleh Bapak Mukhlis Sufri (Anggota DPS).

“Perusahaan yang berkaitan dengan ini juga akan juga memberi yatim piatu, membina panti-panti asuhan yah, nah itu juga bagian dari kegiatan sosial, selain CSR juga ada, dana yang diinvestasikan untuk orang-orang miskin, yah tidak semua harus dari CSR, harus ada dari apa namanya, kegiatan-kegiatan dilakukan oleh, katakanlah pemberian zakat, infaq,

sedekah, yah, nggak bisa, Iyakan, dana-dana kebajikan yang diarahkan kesitu, tetapi, sepanjang itu tidaklah merubah prinsip-prinsip syariah.”

Perbankan yang berdasarkan syariah dan dibangun dengan landasan metafora zakat memang tidak mementingkan dirinya sendiri. Inilah fungsinya CSR atau *corporate sosial responsibility* yang diterapkan Bank Sulselbar Syariah. Selain CSR juga terdapat dana kebajikan yang akan dialokasikan seperti alokasi zakat, infaq, dan lain-lain. Dana ini dialokasikan kepada aktifitas yang tidak merubah prinsip syariah.

Penyatuan antara aspek maskulin dan feminin perbankan syariah terlihat dari metafora zakat yang bentuk pelaksanaannya selain CSR juga menggunakan yaitu dana kebajikan. Dari sisi maskulin perbankan syariah mengelola modal yang di investasikan oleh nasabah dimana perbankan syariah mendapatkan laba tetapi laba disini bukan hanya diperhitungkan untuk kepentingan perbankan syariah tetapi juga diperuntukkan bagi *stakeholder* tidak langsung yaitu dialokasikan ke zakat, infaq dan yang sesuai dengan syariah.

Dewan pengawas syariah ahli dalam hukum-hukum Islam dan berfungsi untuk memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk bank syariah kemudian bersama dengan dewan komisaris mengawasi pelaksanaannya (Widyanto (Muhammad (2010: 1580). Intinya, tugas utama dari dewan pengawas syariah ini adalah mengawasi pelaksanaan operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari aturan syariah (Widyanto (Antonio (2010: 1580). Tugas tersebut dipaparkan oleh Bapak Mukhlis Sufri:

“Sebetulnya memang substansi dari kepengawasan bagian di dalam menasehati jangan sampai dia terjebak keluar dari prinsip-prinsip Al

Quran, prinsip-prinsip apa yg syaratkan di dalam fatwa dewan syariah nasional.”

Agar kesyariahan perbankan terjaga maka DPS melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah dari produk sampai kepada pelaksanaan produk tersebut. Fatwa agama yang diberikan DPS tetap disandarkan kepada Dewan Syariah Nasional. Fatwa yang diberikan kepada direksi atau manajemen perbankan syariah bukan dari DPS sendiri tetapi telah diberikan oleh DSN melalui fatwan DSN. Dari sinilah bentuk nasehat atau bisa dikatakan fatwa agama yang diberikan kepada DPS yang disampaikan kepada direksi atau manajemen.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Proses penempatannya dimulai dari pihak perbankan syariah mengusungkan ke DSN. Seperti yang dikatakan Bapak Mukhlis Sufri (Anggota DPS).

“Dewan pengawas syariah itu kan memang diangkat ya. Diusungkan oleh lembaga. Diusungkan ke dewan syariah nasional ya. DSN itu memberi rekomendasi, diujilah disitu apakah layak atau tidak sebagai pengawas syariah.”

Anggota DPS harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Dalam hal ini Bank Syariah telah mengangkat anggota DPS, yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham dan direksi.

Langkah–langkah pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya oleh DPS BPRS, dalam Surat Edaran

Bank Indonesia Nomor 15/ 22 /DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: 1) Melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; 2) Meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS; 3) Melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS; 4) Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah; 5) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen; 6) Meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS; 7) Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS; dan perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan; 8) Melakukan pembahasan dengan BPRS mengenai hasil temuan pengawasan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat; 9) Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas kegiatan usaha BPRS; 10) Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, termasuk dalam pembahasan exit meeting hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

Langkah–langkah pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya oleh DPS BPRS, sesuai dengan pelaksanaan DPS di Bank Sulselbar Syariah, berikut pernyataan Bapak Mukhlis Sufri:

”Itu mengawasi ya, menilai, mengevaluasi, proses jalannya ee peran industri keuangan syariah itu ya, menghadapi produknya, lingkungan dunia usahanya, seperti apa, supaya betul-betul sesuai dengan tujuan syariah atau maqashid syariah ya.”

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS bukan hanya dari satu sisi saja seperti aqad-aqad dalam produk perbankan syariah tetapi pada seluruh jalannya operasional perbankan syariah. Karena perbankan syariah tujuan utamanya adalah menjadikan prinsip syariah sebagai landasan dalam segala aktifitasnya. Dimana landasan itu berasal dari aturan Sang Pencipta segala sesuatu di muka bumi.

Pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah merupakan hal yang sangat penting. Begitupun dengan yang dilaksanakan oleh DPS di PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar. Pengawasan DPS merupakan pengawasan terhadap seluruh aktifitas operasional perbankan syariah supaya memenuhi prinsip syariah. Pengawasan ini dilakukan secara terus-menerus tetapi dalam pengawasan DPS disini mengawasi hanya dalam waktu tertentu saja tidak dilakukan setiap hari.

Tanggung jawab DPS juga untuk mengawasi perbankan syariah dimana perbankan syariah dibangun dari metafora amanah maka pengawasan DPS merupakan amanah yang secara tidak langsung diberikan oleh nasabah. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Syaiful Anwar (*Costumer Service*).

“Ketika sudah berjalan itu suatu bentuk aturan nanti dari sisi DPS bisa dilihat apakah memang realita yang terjadi dilapangan itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan perbankan itu sendiri modal atau kepercayaan kita dari nasabah”

Dengan terjaganya aturan sesuai dengan syariah maka nasabah dalam perbankan syariah merasa nyaman dan aman untuk berinvestasi. Kenyamanan tersebut didapatkan dari metafora amanah yang telah dilakukan oleh perbankan syariah.

“Kita juga mengoreksi selain kesesuaian aqad, ketepatan kesyariahan, hukum-hukum yang menyertai kemudian juga dilihat katakanlah misalnya DPS juga akan melihat perkembangan baru, ada produk-produk baru ya, kita uji, ada uji petik juga uji petik itu yang harus dilakukan apa cocok nggak ya, nah kalau hal-hal yang baru, itu penting.”

Dalam sebuah perbankan syariah, sebuah perbankan menyeimbangkan sifat egoistik dan altruistiknya dan untuk menjaga agar sifat *altruistic* tetap ada maka dibutuhkan proses pengawasan, dimana hal ini yang dilakukan oleh DPS dalam perbankan syariah.

Resiko dari perbankan yang berdasar pada syariah adalah tidak melakukan transaksi yang berbasis riba dan sebagai muslim wajib untuk menjauhi hal tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ali-Imran/3: 130.

ثُمَّ لِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat di atas menunjukkan konsekuensi dari perbankan yang berdasar pada syariah bahwa perbankan tidak boleh melakukan transaksi ribawi. Hal ini sesuai dengan prinsip perbankan yang menganut atau berprinsip pada metafora amanah dan metafora zakat. Perbankan syariah melakukan transaksi dan aktifitas operasional dengan jujur dan mengeluarkan zakat sebagai akuntabilitas perbankan syariah terhadap menerapkan aturan syariah.

Dewan pengawas syariah atau DPS yang bertugas sebagai pengawas segala kegiatan perbankan syariah melakukan pengawasan secara menyeluruh baik dari segi operasional maupun pada produk perbankan syariah. Segala aktifitas operasional perbankan didasarkan pada prinsip syariah begitupun dengan produknya. Tidak ada aktifitas yang berada di luar prinsip syariah seperti melakukan transaksi yang berdasar pada riba, sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebagai orang yang beriman tidak boleh memakan riba karena riba merupakan perilaku yang tidak di ridhai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Ar Ruum ayat/30: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Mencapai keridhaan Allah dengan tidak melakukan aktifitas ribawi sudah termasuk dalam prinsip syariah. Tetapi selain aktifitas tersebut, perbankan syariah harus menerapkan sifat adil dan ihsan dalam segala aktifitasnya. Sifat adil yaitu menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya sedangkan ihsan bersifat selalu merasa diawasi oleh Sang Pencipta sehingga dalam setiap aktifitasnya tidak ada hal yang dilakukan di luar dari prinsip syariah. Hal ini telah diterapkan oleh perbankan syariah PT. Bank Sulselbar Syariah, sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Mukhlis Sufri (anggota DPS).

“Manusia sebagai hamba Allah menjalankan amanah dan tugasnya serta tunduk pada syariat Islam secara kaffah, iya kan, bayar zakat, iya kan, begitu. Yang kedua adalah filosofi ekonomi, filosofi keuangan Islam itu, orang yang menjalankan amanah muamalah ndk boleh berdimensi riba kan, ini ndk boleh”

Kepatuhan yang berlandaskan pada syariah yang dilaksanakan oleh perbankan sangatlah penting karena Dewan Pengawas Syariah sebagai rambu lalu lintas bagi perbankan syariah. Tugasnya untuk menjaga kredibilitas perbankan sehingga para nasabah dapat mempercayakan dana yang telah diinvestasikan atau melakukan transaksi lain. Disini menunjukkan pertanggungjawaban perbankan syariah terhadap *stakeholder* manusia dalam perbankan.

Segala hal yang berkaitan dengan perbankan syariah wajib melaksanakan aktifitasnya berdasar pada prinsip syariah dan inilah yang dilakukan DPS sebagai pengawas, mengawasi jalannya operasional perbankan syariah sehingga tidak ada aktifitas yang menyimpang dari aturan syariah tersebut.

C. Fungsi Audit Syariah Ditinjau Dari Filosofi Keuangan Islam Pada Lembaga Keuangan Syariah

Audit syariah merupakan lembaga independen yang bertugas membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksa. Dalam melaksanakan tanggung jawab audit internal, sebuah standar praktik menjadi hal yang diperlukan agar auditor internal mampu menjaga kompetensi dan konsistensinya dalam melakukan pekerjaan. Standar ini terdapat di dalam aturan BI. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Ilham (audit internal).

“Rujukan audit syariah dalam mengaudit perbankan adalah Al-quran dan Hadits, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa Dewan Pengawas Syariah, Surat Keputusan Direksi, dan Surat Edaran Direksi.”

Pelaksanaan audit bukan sekedar melaksanakan tetapi mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Aturan yang paling penting adalah dari Al- Qur'an dan hadits. Ini menjadi pedoman utama dalam perbankan syariah. Karena aturan tersebut berasal dari Sang Pencipta. Bentuk tanggungjawab perbankan syariah kepada Sang Pencipta terlihat dari penerapan aturan syariah yang berdasar pada Al- Qur'an dan hadits.

Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktifitas bank syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan

sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah (Minarni (2013: 33). Audit syariah memang berfungsi seperti yang disebutkan di atas, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Keuangan Bank Sulselbar Syariah.

“Pemeriksaan sistematis atas kepatuhan seluruh aktivitas LKS terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis LKS, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta aktivitas lainnya yang memerlukan ketaatan terhadap prinsip syariah”

Keberadaan audit dalam perbankan syariah tidak lepas dari melakukan pemeriksaan atas seluruh kegiatan perbankan syariah dengan tujuan tidak terdapat kecurangan atau pelanggaran aturan syariah di dalamnya. Hal ini menandakan bahwa aktifitas perbankan syariah di dasarkan pada aturang Sang Pencipta segalanya sebagaimana penempatan akuntabilitas tertinggi pada Tuhan.

Audit syariah tetap menjadi bagian dari matafora amanah seperti awal sebuah perbankan berdasar syariah di bangun. Metafora amanah yang dijalankan perbankan syariah berupa jalannya operasional perusahaan yang tidak keluar dari aturan prinsip syariah baik dari segi transaksi secara langsung maupun dari segi proses transaksi menggunakan teknologi.

Proses aktifitas pemeriksaan sistematis atau pemeriksaan secara menyeluruh tercantum dalam firman Allah dalam QS. Al Hujurat/49: 6 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu".

Ayat di atas memerintahkan untuk melakukan proses pemeriksaan sebelum mengambil sebuah keputusan. Wajib bagi perbankan syariah untuk melakukan hal ini agar perbankan syariah terhindar dari perilaku kecurangan. Audit syariah juga melaksanakan segala aktifitasnya berdasarkan pada sifat adil dan ihsan. Sifat ihsan bahwa seorang hamba merasa bahwa dirinya selalu diawasi oleh Sang Pencipta. Bersifat adil dan ihsan merupakan bagian dalam prinsip syariah atau aturan syariah, anatra audit syariah dan sifat adil dan ihsan yang merupakan filosofi keuangan islam sangat berkaitan. Hal tersebut sebagai aturan untuk menghindari perilaku kecurangan dalam operasional perusahaan.

Menurut Bank Negeri Malaysia, audit syariah adalah penilaian independen secara periodik dan penjaminan yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan menambahkan derajat kesesuaian pada operasi lembaga keuangan Islam, dengan tujuan memastikan sistem kontrol internet yang ada sesuai dengan asas syariah. Audit Syariah dilakukan oleh departemen independen yang menjadi bagian dari audit internal dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi pada suatu institusi dan melihat kesesuaiannya dengan aturan syariah, fatwa, dan ketentuan lainnya yang diterbitkan oleh IFI dan Syariah Supervisor Board (AAOIFI Governance Standard (GSIFI) 3).

Pengertian audit syariah diatas sesuai dengan yang diterapkan di dalam Bank Sulselbar Syariah, Bapak Ilham (audit syariah) menambahkan bahwa: "Audit syariah adalah audit untuk Lembaga Keuangan Syariah untuk memastikan tidak bertentangan dengan aturan syariah."

Perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya harus berdasarkan maqashid syariah sehingga nilai spiritual yang diemban oleh perbankan tidak hanya sekedar nama belaka, karena itu kehadiran audit syariah untuk memastikan perbankan syariah tetap berada pada koridor syariah.

Kehadiran audit syariah sebagai bentuk kontrol perusahaan menjadi hal yang tidak bisa lepas dari perbankan syariah karena nasabah yang menjadi going concern perbankan merasa aman telah berinvestasi pada perbankan tersebut dengan harapan adanya audit syariah akan membuat nasabah mendapatkan pengembalian yang lebih baik.

Kebutuhan atas kepastian pemenuhan syariah ini mendorong munculnya fungsi audit baru, yaitu audit syariah. Dalam hal ini, auditor syariah memegang peran krusial untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuhan aspek syariah. Sehingga stakeholder merasa aman berinvestasi dan dana yang dimiliki oleh LKS dapat dipastikan telah dikelola dengan baik dan benar sesuai syariat Islam (Mardiyah dan Mardiah, 2015 : 3).

Fungsi audit syariah adalah sebagai sebuah sistem yang memeriksa kepatuhan operasi-operasi keuangan syariah berdasarkan hukum syariah (Mardiyah dan Mardiah (Shafeek, 2015). Yang dipaparkan oleh Kepala Keuangan Bank Sulselbar Syariah.

“Pelaksanaan fungsi audit intern pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Grup Audit Intern telah melaksanakan pemeriksaan pada seluruh unit kerja Bank Sulselbar termasuk dalam rangka menilai efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan penerapan GCG, dan melaporkan hasilnya pada Manajemen Bank.”

Pelaksanaan audit syariah oleh audit Intern perbankan merupakan penilaian tentang jalannya operasional perbankan syariah sesuai dengan aturan syariah. Pada wawancara terhadap pihak terkait beliau mengungkapkan pelaksanaan dari fungsi audit syariah tersebut. Berikut petikan wawancara.

“Saat ini Audit Intern PT. Bank Sulselbar terhadap Unit Usaha Syariah (UUS) masih merupakan satu kesatuan dengan Audit Intern PT. Bank Sulselbar yaitu Grup Audit Intern (GAI), yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap audit yang dilakukan di PT. Bank Sulselbar. GAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui Direktur Utama.”

Audit internal perbankan syariah memang masih satu dengan audit internal pada perbankan berbasis konvensional tetapi ini tidak mengurangi sisi independen dan aturan syariah yang berlaku sebagaimana Bapak Ilham (audit syariah) yang mengatakan bahwa:

“Audit Internal Bank Sulselbar Syariah memang belum terpisah untuk sementara, proses pemisahannya terjadi nanti pada tahun 2021 tetapi bagian audit internal telah menyiapkan perwakilan satu orang untuk mengawasi kegiatan perbankan syariah.”

Sebelum dilakukannya pemisahan antara audit syariah dengan audit berbasis konvensional tidak mengurangi atau bahkan membuat audit syariah ini melenceng dari prinsip syariah karena audit syariah tetap berjalan sesuai koridornya sebab audit syariah tetap memperhatikan dari pihak nasabah perbankan.

Nasabah sebagai salah satu *going concern* perbankan menjadi hal yang sangat penting di perhitungkan karena kehilangan kepercayaan dari pihak nasabah membuat perbankan syariah menjadi terpuruk bahkan bisa menimbulkan kepailitan yang menyebabkan perbankan syariah tinggal sebuah nama.

Audit syariah yang telah berjalan sesuai dengan perencanaan Direktur Utama, jika mendapatkan temuan-temuan maka langsung diberikan kepada Direktur Utama dan DPS, berikut petikan wawancara dengan Kepala Keuangan perbankan syariah:

”Hasil temuan GAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Selanjutnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) memantau apakah telah dilakukan langkah-langkah terkait temuan audit tersebut.”

Proses pelaksanaan audit syariah selalu terkait dengan DPS. Karena perbankan syariah yang menjadikan ia berbeda dengan perbankan konvensional adalah pengawasan di dalamnya begitu ketat tetapi tidak mengekang. Ini dimaksudkan dengan kemajuan global sekarang membuat perbankan syariah justru tidak ikut arus dengan iklim berdimensi riba, karena itu pengawasan yang dilakukan merupakan pengawasan pencegahan.

Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun 2015 telah mencakup audit atas Laporan Keuangan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang ada pada UUS di PT. Bank Sulselbar. Menurut Harahap (2002:160), menjelaskan tujuan audit syariah adalah:

”Tujuan audit adalah agar auditor mampu menyatakan suatu pendapat apakah laporan keuangan yang disusun oleh lembaga itu, dari semua aspek yang bersifat material, *“true and fair”* atau benar dan wajar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, standar akuntansi IIAOFI, serta standar dan praktek akuntansi nasional yang berlaku di negara itu. Pendapat audit tidak memberikan keyakinan yang menyangkut kesehatan suatu lembaga dimasa yang akan datang dan juga tidak menilai efisiensi atau efektivitas pelaksanaan tugas manajemen.”

Pada wawancara dengan Bapak Ilham (audit syariah) pada Bank Sulselbar syariah, Ungkapannya sesuai dengan ungkapan Harahap. Beliau mengungkapkan bahwa:

”Tujuan utama audit syariah adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang disiapkan manajemen (perusahaan), dalam semua aspek material telah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah.”

Audit syariah berfungsi mengawasi segala aspek operasional sesuai dengan prinsip syariah agar laporan keuangan yang dipublikasikan dapat dipercaya. Pemenuhan tanggungjawab berupa amanah dari mitra atau nasabah dipenuhi oleh perbankan syariah. Tanggungjawab ini termasuk dalam *stakeholder* manusia.

Menurut Kasim et. al (2013: 23) dalam *IOSR journal of business and management* bahwa audit syariah memiliki tanggungjawab dalam mengemban tugasnya, salah satunya adalah dengan mengarahkan perbankan syariah pada kepatuhan syariah beserta hal-hal yang harus dilakukan seorang audit dalam mengemban tanggungjawabnya sebagai seorang auditor.

Pernyataan tersebut sesuai dengan praktik audit yang dilakukan auditor pada Bank Sulselbar Syariah, berikut pernyataan Bapak Ilham.

“Audit syariah adalah sebuah proses pemeriksaan sistematis atas kepatuhan seluruh aktivitas bank terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan, produk perbankan, penggunaan IT, operasional, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta aktivitas lainnya yang memerlukan ketaatan terhadap prinsip syariah.”

Dalam menjaga nilai spiritual perbankan maka diperlukan dukungan dari divisi. Dalam segala aktifitas perbankan wajib menjaga eturan syariah, karena itu

hal yang mendukung perbankan syariah adalah audit syariah yang melakukan proses pemeriksaan ke segala lini perbankan.

D. Keterkaitan Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah dan Fungsi Audit Syariah Ditinjau Dari Filosofi Keuangan Islam

Pengertian DPS menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dalam Governance Standard for Islamic Financial Institutions (GSIFI) nomor 1 paragraf 2 dinyatakan bahwa:

“A shari’a supervisory board is a independent body of specialized jurists in fiqh mu’amalat (Islamic commercial jurisprudence). However, the Shari’a supervisory board may include a member other than those specialized in fiqh mua’alat, but who should be an expert in the field of Islamic Financial institutions and with knowledge of fiqh mua’alat...”.
Artinya:

“Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen yang mempunyai spesialisasi keahlian dalam fikih muamalah (hukum keuangan Islam). Namun demikian, anggota Dewan Pengawas Syariah tidak hanya (dituntut) mempunyai spesialis dalam fikih muamalah, tetapi juga harus ahli dalam dalam bidang lembaga keuangan Islam dan mempunyai pengetahuan tentang fikih muamalah.”

Pendapat lain diungkapkan dalam jurnal ekonomi Islam oleh Faozan (Muhammad (2010: 3), Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum, jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 3 (tiga) orang. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah

satu anggota DPS. (PBI No. 11/23/PBI/2009 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pasal 28 dan pasal 30)

DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank syariah. Anggota DPS terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga mengetahui pengetahuan umum di bidang perbankan. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utamanya adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN (Faozan (Arifin (2010: 9).

Dewan pengawas syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat (Fiqh Al-Muamalat). Namun DPS bisa juga anggota di luar ahli fiqh tetapi ahli juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat. Dewan pengawas syariah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, meriview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam (Masliana (Harahap (2011: 15).

Dari pernyataan tersebut dewan pengawas syariah selain memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugasnya membutuhkan kepatuhan sebagai petunjuk dalam mengevaluasi perbankan syariah, kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Prinsip syariah adalah yaitu segala ketentuan yang

mengacu dan berdasarkan pada hukum Islam yaitu Alqur'an dan Sunnah. Untuk dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar sehingga dapat diterapkan secara lebih pragmatis, dilakukan perumusan aturan teknis, termasuk di dalamnya aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang dalam suatu sistem hukum negara tertentu ke dalam bentuk bentuk peraturan hukum yang bersifat amaliah yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Fungsi audit syariah adalah sebagai sebuah sistem yang memeriksa kepatuhan operasi-operasi keuangan syariah berdasarkan hukum syariah (Mardiyah dan Mardiah (Shafeek, 2015) sedangkan filosofi keuangan Islam memuat dua hal yaitu adil dan ihsan.

1. Adil

Adil diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak dengan kata lain berlaku adil adalah menegakkan yang haq dan berpegang pada kebenaran. Meminimumkan biaya produksi dan menggunakan sumber daya alam secara maksimal merupakan bagian dari adil karena hal tersebut adalah sikap yang tidak berlebih-lebihan. Sikap adil sangat diperlukan dalam setiap tindakan termasuk dalam tindakan berekonomi dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar.

Sikap adil ditunjukkan juga dengan tidak melakukan transaksi yang berdasar pada riba yang dilaksanakan oleh perbankan syariah. Dikatakan adil karena riba merupakan tambahan atas piutang yang terjadi sehingga ketika riba diterapkan ini mengakibatkan ketidakadilan sebab piutang yang harus dibayarkan pihak pemimjam bertambah. Hal tersebut terjadi karena transaksi berdasar pada riba memberikan keuntungan hanya pada pihak yang memberikan pinjaman.

Adil dalam Islam pengertiannya adalah *menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya*. Sikap adil sangat diperlukan dalam setiap tindakan termasuk dalam tindakan berekonomi. dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar.

2. Ihsan

Ihsan yaitu seorang manusia menyembah Rabbnya dengan ibadah yang dipenuhi rasa harap dan keinginan, seolah-olah dia melihat-Nya sehingga diapung sangat ingin sampai kepada-Nya, dan ini adalah derajat ihsan yang paling sempurna. Tapi bila dia tidak bisa mencapai kondisi semacam ini maka hendaknya dia berada di derajat kedua yaitu: menyembah kepada Allah dengan ibadah yang dipenuhi rasa takut dan cemas dari tertimpa siksa-Nya.

Ihsan dalam syariah berfungsi sebagai alat control dan evaluasi terhadap bentuk-bentuk kegiatan ibadah, sehingga aktivitas manusia akan lebih terarah dan maju. Merasa bahwa Allah selalu mengawasi aktifitas manusia membuat manusia tidak serakah dengan gemerlapnya dunia. Hal tersebut tercermin dengan sikap tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi juga memikirkan orang lain. Sifat ihsan di dalamnya terdapat keinginan untuk berbuat baik dan menyebarkan kebaikan, hal ini terdapat pada PT. Bank Sulselar Syariah yang menerapkan sikap saling berbagi melalui kegiatan sosial baik berupa CSR atau menggunakan dana kebajikan untuk program sosial. Selain itu, karena merasa selalu diawasi oleh Sang Pencipta akan mengurangi bahkan meniadakan tindak kecurangan yang terjadi.

Ihsan dalam syariah berfungsi sebagai alat control dan evaluasi terhadap bentuk-bentuk kegiatan ibadah, sehingga aktivitas manusia akan lebih terarah dan maju. Fungsi tersebut selaras dengan definisinya sendiri yaitu, ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, apabila engkau tidak mampu melihat-Nya maka sesungguhnya Allah melihat (mengontrol) engkau.

Keterkaitan kepatuhan dewan pengawas syariah dan fungsi audit syariah adalah dewan pengawas syariah yang terikat dengan kepatuhan syariah wajib menjadikan prinsip syariah sebagai aturan dalam perbankan dalam mengawasi produk-produk perbankan terutama pada produk baru dan mengawasi operasional perbankan, audit syariah juga berperan penting karena audit syariah melakukan pemeriksaan sistematis atas seluruh aktifitas perbankan baik yang terkait dengan IT, operasional, dokumen, kebijakan dan prosedur. Disinilah fungsi audit syariah menjalankan tugasnya dengan yang memeriksa kepatuhan operasi-operasi keuangan syariah berdasarkan hukum syariah.

Kepatuhan dewan pengawas syariah dan fungsi audit syariah tidak lepas dari filosofi keuangan Islam, yaitu bersikap adil dan memiliki sifat ihsan yang menghadirkan Sang pencipta di setiap aktifitasnya. Merasa selalu diawasi oleh Sang Pencipta sehingga aktifitasnya akan terhindar dari kecurangan. Dewan pengawas syariah dan audit syariah menghadirkan hal tersebut sebagaimana ungkapan dari Bapak Ilham (audit syariah).

“Berhubungan, karena audit hadir untuk memastikan tidak bertentangan dengan aturan syariah ”

Ditambahkan oleh Bapak Mukhlis Sufri (anggota DPS).

“Islam dibangun landasannya ya tentu berdasar pada ketauhidan ya, kalau Umar Capra bilang itu harus diawali dari tauhid dan disitulah eksistensi manusia sebagai hamba Allah yang harus menjalankan amanah ya, menjalankan tugasnya ya dia Islam tapi dia tunduk pada syariat Islam secara kaffah, iya kan, bayar zakat, iya kan, begitu. Yang kedua adalah filosofi ekonomi, filosofi keuangan Islam itu, orang yang menjalankan amanah muamalah ndk boleh berdimensi riba kan, ini ndk boleh”

Sebagai perbankan syariah yang mengemban metafora amanah dan metafora zakat maka perbankan syariah harus menjalankan segala aktifitasnya dengan aturan syariah. Karena perbankan syariah merupakan wadah bagi umat muslim dalam melaksanakan aktifitasnya tanpa menggunakan riba sehingga perbankan syariah wajib menjaga kepercayaan umat muslim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa:

1. Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah sudah sesuai dengan filosofi keuangan islam. Kepatuhan merupakan manifestasi dari seluruh prinsip syariah, dimana Dewan Pengawas Syariah menerapkannya dalam bentuk pengawasan terhadap akad, dari peluncuran produk sampai pada penggunaan produk perbankan secara berlanjut. Penerapan aturan DSN (Dewan Syariah Nasional) menjadi rujukan Dewan Pengawas Syariah. Pelaksanaan CSR dan dana kebajikan sebagai bentuk tidak memntingkan diri sendiri pada pihak perbankan termasuk dalam filosofi keuangan islam. Hal tersebut sesuai dengan filosofi keuangan islam yang bersifat transparan, adil, dan ihsan. DPS melaksanakan kewajibannya dengan transparan, adil dan bersifat ihsan (menghadirkan Allah swt dalam setiap aktifitasnya) yang dituangkan dalam kepatuhan syariah.
2. Fungsi audit syariah sudah sesuai dengan filosofi keuangan islam. Audit syariah mengadopsi prinsip syariah berlandaskan pada Al- Qur'an, hadits, dan lembaga independen yang memberikan fatwa. Fungsi audit syariah melakukan pengawasan dan mengontrol perbankan syariah agar terhindar dari riba, gharar, dan penyimpangan yang lian. Konsekuensi dari ketaatan terhadap Allah swt adalah menjadikan aturan-Nya sebagai patokan utama.

3. Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah sangat berkaitan dengan fungsi audit syariah, keduanya berkaitan dalam hal pengawasan terhadap operasional perusahaan dan manajemen. Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah yang memiliki pengetahuan fiqh muamalah mengawasi produk-produk syariah dan audit syariah yang bertindak membuat laporan audit sampai diterbitkan menjadi laporan keuangan sebagai bentuk publikasi kinerja perbankan syariah. Pelaksanaan kepatuhan Dewan Pengawas Syariah yang berkaitan dengan fungsi audit syariah tetap pada koridor syariah, hal ini sesuai dengan filosofi keuangan Islam.

B. Saran

Penerapan kepatuhan Dewan Pengawas Syariah dan fungsi audit syariah ditinjau dari filosofi keuangan Islam pada PT Bank Sulselbar Syariah harus diterapkan secara optimal dan konsisten. Dewan Pengawas Syariah yang menjalankan kepatuhan berdasarkan prinsip syariah mengawasi perbankan syariah harus setiap hari dalam jam kerja bukan dalam waktu tertentu saja. Fungsi audit syariah yang berdasarkan pada prinsip syariah menjalankan pengawasan dan kontrol dengan optimal pada perbankan syariah dengan membentuk tim independen dengan memisahkan diri dari grup audit konvensional.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya melakukan di satu perbankan saja, untuk selanjutnya jika ingin memperluas penelitian ini maka diperluas dengan membandingkan dengan perbankan syariah yang lain sehingga

bisa mengetahui bagaimana pelaksanaan aturan dan prinsip syariah yang dilakukan oleh DPS dan audit syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI, Governance Standards for IFIs, No. 1-5, Bahrain, AAOIFI, 2005.
- Alqur'an dan Terjemahnya, *Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Yang Menaungi Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy Syarif (Kompleks Percetakan Alqur'an Raja Fahd)*, 1990.
- Abidin, Pengawasan Perbankan Syariah (Studi Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio), *Maliyah*, 1 (1), 2011.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, *Accounting and Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions*. Manama Bahrain: AAOIFI, 1999.
- Anggadini, Sri Dewi, Bidang Ekonomi, Bandung, *Majalah Ilmiah UNIKOM*, No.1 Vol. 12, 2011.
- Arman, Saleh Md., Shariah Compliance Features of Islamic Financial Institutions and Its Challenges, *Arabian Journal of Bussiness and Management Review (OMAN Chapter)*, 3 (4), 91-98, 2013.
- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, 2011.
- Chariri, Anis, Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif, *Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA)*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli-1 Agustus, 2009.
- DSN, DSN No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional MUI, 2000.
- Faozan, Akhmad, Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah, *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, VII (1): 1-14, 2013.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Auditing dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002.
- Hayyi, Abdul, Efektifitas Pengawasan Bank Syariah Studi Terhadap Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram, *TESIS*, UIN Sunan Kalijaga, 2011.

<http://www.larispa.or.id/publikasi/artikel/123-preferensi-masyarakat-terhadap-bank-syariah-menyambut-2-tahun-pencanangan-ekonomi-syariah-di-sumut-.html>, diakses tanggal 10 maret 2016.

<http://banksulselbar.co.id/corporate-site/profil-perusahaan>, diakses tanggal 12 April 2016.

Ilhami, Haniah, Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah, *Mimbar Hukum*, Volume 21 (3): 409-628, 2009.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2014.

Islamic Financial Service Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, h. 3, 2009.

Karim, Rifaat Ahmed Abdel, Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions, *Proceedings of the Second Harvard University Forum on Islamic Finance: Islamic Finance into the 21st Century Cambridge, Massachusetts*, 239-241, 1999.

Kasim, Nawal dan Zuraidah Mohd Sanusi, Emerging issues for auditing in Islamic Financial Institutions: Empirical evidence from Malaysia, *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 8(5), 10-17.

Mardiyah, Qonita dan Mardiah, Sepky, Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia, *AKUNTABILITAS*, Vol. VIII (1): 01 - 17, April 2015.

Minarni, Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah, *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, VII (1), 29-40, 2013.

Mulawarman, Aji Dedi, Menggagas Neraca Syari'ah Berbasis *Maal*: Kontekstualisasi ''kekayaan Altruistik Islami'', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4 (2), 169-192, 2007.

PBI, PBI No. 6/24/PBI/2004 mekanisme kerja DPS, 2004.

Rahardjo, Mudjia, Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif, <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses tanggal 26 November 2015, 2010.

- Rahmanti, Virginia Nur, Mengapa Perbankan Syariah Masih Disamakan Dengan Perbankan Konvensional?, *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI*, 1 (1), 1-74, 2013.
- Razak, Mohd Zamerey bin Abdul dan Nurmaezah binti Omar, Audit Syariah Dalam Institusi Kewangan Islam Di Malaysia, *Jurnal Muamalat*, 135-150, 2008.
- Rochaeli, Ira wati, Fungsi Dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit usaha Syariah PT. Bank “X” Dikaitkan dengan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), *TESIS*, Universitas Indonesia, 2011.
- Shafii , Zurina, dkk, Management of *Shariah* Non-Compliance Audit Risk in the Islamic Financial Institutions via the Development of *Shariah* Compliance Audit Framework and *Shariah* Audit Programme, *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 3-2 March: 3–16, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sula, Atik Emilia, M Nizarul Alim, dan Rahmat Zuhdi, Zakat Terhadap Aktiva: Konsepsi, Aplikasi dan Perlakuan Akuntansi, *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*, 2010.
- Sumitro, warkum, 2004, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tanya Jawab Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011, *Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, 2011.
- Triyuwono, Iwan, Menggagas Sing Liyan Untuk Formulasi Nilai Tambah Syari’ah, *Simposium Nasional Akuntansi X*, Unhas Makassar, 26-28 Juli, 2007.
- Triyuwono, Iwan, Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari’ah, *IQTISAD Jurnal of Islamics Economics*, 4 (1), 79-90, 2003.
- Widyanto, Eko Adi, Peran Independensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Loyalitas Penerapan Syariat Islam, *JURNAL EKSIS*, 6 (2), 1440-1605, 2010.

RIWAYAT HIDUP



HARIYANTI, Dilahirkan di Majannang Kec. Parigi Kab. Gowa pada tanggal 26 Maret 1993. Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara, buah hati dari Ayahanda H. Daccang dan Ibunda Hj. Dakking. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar SD Negeri Longka. Setelah tamat SD pada tahun 2005, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Parigi, kemudian pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sungguminasa, pada tahun 2011 kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

LAMPIRAN

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/ 2 /PBI/2011
TENTANG
PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kompleksitas kegiatan usaha bank semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan;
 - b. bahwa kompleksitas kegiatan usaha bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha bank;
 - c. bahwa untuk memitigasi risiko kegiatan usaha bank diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*);
 - d. bahwa upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha bank;
 - e. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf d diperlukan peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan yang ada pada Bank sehingga potensi risiko kegiatan usaha bank dapat diantisipasi lebih dini;

f. bahwa . . .

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diperlukan pengaturan mengenai fungsi kepatuhan Bank Umum dan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*);

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk didalamnya kantor cabang bank asing, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
3. Dewan Komisaris:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.

4. Direksi: . . .

4. Direksi:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian;
 - d. bagi Kantor Cabang Bank Asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing.
5. Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
7. Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

8. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 2

- (1) Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- (2) Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.
- (3) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

BAB II

FUNGSI KEPATUHAN BANK

Pasal 3

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan.
- (2) Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh satuan kerja kepatuhan.

Pasal 5

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada Bank Umum Syariah dan/atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Pasal 6

- (1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan:
 - a. mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun;
 - b. memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

BAB III
DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

Bagian Pertama
Independensi dan Kriteria

Pasal 7

- (1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi.
- (2) Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- (3) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi :
 - a. bisnis dan operasional;
 - b. manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;
 - c. *treasury*;
 - d. keuangan dan akuntansi;
 - e. logistik dan pengadaan barang/jasa;
 - f. teknologi informasi; dan
 - g. audit intern.

Pasal 8

Calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengangkatan, Pemberhentian, dan/atau Pengunduran Diri Direktur yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum dan Bank Umum Syariah.
- (2) Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
- (3) Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, maka Bank wajib segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- (4) Selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank wajib menunjuk atau menugaskan salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- (5) Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, baik karena berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maupun berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).

(6) Dalam . . .

- (6) Dalam hal Direktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada, maka jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat dirangkap sementara oleh Direktur lainnya yang membawahkan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (7) Penggantian sementara jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Pasal 10

- (1) Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup:
 - a. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
 - b. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - c. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
 - d. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
 - e. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;

f. melakukan . . .

- f. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

Pasal 11

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, paling kurang secara triwulanan.

BAB IV

SATUAN KERJA KEPATUHAN

Bagian Pertama

Independensi dan Kriteria

Pasal 12

- (1) Satuan kerja kepatuhan harus independen.
- (2) Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.

(3) Satuan . . .

- (3) Satuan kerja kepatuhan pada Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib didukung oleh personil yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

Pasal 13

Kriteria kepala satuan kerja kepatuhan:

- a. memenuhi persyaratan independensi;
- b. menguasai ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
- d. memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).

Pasal 14

Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Pasal 15

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan paling kurang mencakup:

- a. membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- b. melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

c. menilai . . .

- c. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- e. melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 16

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi:

- a. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam rencana bisnis Bank;
- b. Laporan kepatuhan; dan
- c. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, wajib ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan disampaikan kepada Bank Indonesia secara semesteran dan diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.
- (2) Laporan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya wajib disampaikan untuk periode pelaporan Juli sampai dengan Desember 2011.
- (3) Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan diterima Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan.
- (4) Bank dianggap tidak menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan tersebut belum diterima Bank Indonesia hingga akhir batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengenai adanya penyimpangan.

BAB VI

ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 18

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditujukan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia setempat.

(2) Penyampaian . . .

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 16, ditujukan kepada:
- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat diluar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan;
- c. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- d. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- e. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Anggota Koperasi (RAT) mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan
- f. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Pasal 20

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan.
- (2) Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan teguran tertulis oleh Bank Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Sejak tanggal ditetapkannya ketentuan ini, Bank wajib melakukan penyesuaian mengacu pada ketentuan ini paling lambat sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dinyatakan tidak berlaku.

- 16 -

Pasal 23

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Januari 2011

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 6

DPNP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/ 2 /PBI/2011
TENTANG
PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BANK UMUM

I. UMUM

Kegiatan usaha bank terus mengalami perubahan dan peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan, sehingga kompleksitas kegiatannya semakin tinggi. Kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat tersebut mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar.

Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha bank yang semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Upaya-upaya tersebut dapat bersifat *ex-ante* maupun *ex-post*. Upaya yang bersifat *ex-ante* sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan yang baik dan tepat waktu diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin. Dengan demikian peran dan Fungsi Kepatuhan maupun satuan kerja kepatuhan ke depan tidak hanya melihat suatu kejadian yang bersifat *ex-ante* melainkan juga harus mampu mengelola Risiko Kepatuhan agar sejalan dengan penerapan manajemen risiko yang telah berjalan di bank secara keseluruhan.

Selama . . .

Selama ini pengaturan mengenai peran dan Fungsi Kepatuhan maupun direktur kepatuhan belum memadai dan masih menjadi satu dengan pengaturan fungsi audit intern, sehingga terkesan bahwa pengaturan peran dan Fungsi Kepatuhan maupun direktur kepatuhan merupakan bagian dari fungsi audit intern.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dianggap perlu adanya pengaturan tersendiri yang lebih luas dan spesifik mengenai peran dan Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan yang terpisah dari ketentuan tentang fungsi audit intern. Disamping itu, pengaturan ini nantinya diharapkan akan mengubah peran dan Fungsi Kepatuhan maupun satuan kerja kepatuhan menjadi lebih *forward looking* dan lebih sensitif terhadap dinamika perubahan yang terjadi. Dengan demikian, terjadi transformasi mengenai peran dan Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan menuju kearah yang lebih strategis dan lebih berperan dalam mendukung kinerja bank yang lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Khusus bagi Kantor Cabang Bank Asing, pelaksanaan pengawasan terhadap Fungsi Kepatuhan disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada bank yang bersangkutan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tindakan mengelola Risiko Kepatuhan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persyaratan independensi” adalah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governace* bagi Bank Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan fungsi bisnis atau fungsi operasional antara lain meliputi kegiatan penghimpunan dan/atau penyaluran dana dan kegiatan keagenan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Penilaian kriteria calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam pasal ini mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dan ketentuan mengenai pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya disebabkan oleh hal-hal yang bersifat sementara seperti cuti, sakit, dan dinas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” antara lain meninggal dunia, mengalami cacat fisik, dan/atau cacat mental atau kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Pengangkatan pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebijakan kepatuhan” adalah prinsip-prinsip yang akan dipergunakan untuk menyusun sistem, prosedur, dan pedoman internal dalam rangka harmonisasi antara kepentingan komersial Bank dengan ketaatan peraturan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .

Huruf f

Termasuk sebagai tindakan pencegahan antara lain memberikan pendapat yang berbeda/*dissenting opinion* apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggungjawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam melakukan tindakan pencegahan terbatas pada kewenangan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Huruf g

Yang dimaksud tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan antara lain adalah memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perbuatan-perbuatan tertentu” adalah perbuatan-perbuatan yang terkait dengan *corporate actions* antara lain merger, konsolidasi, akuisisi, *right issue*, dan *initial public offering (IPO)*.

Pasal 11

Bagi kantor cabang bank asing, laporan disampaikan kepada pemimpin kantor cabang bank asing dengan tembusan kepada pihak yang berwenang mengawasi kantor cabang bank asing, sesuai dengan struktur organisasi Bank.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan kerja kepatuhan harus independen” adalah satuan kerja kepatuhan harus dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Satuan kerja kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persyaratan independensi” adalah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governace* bagi Bank Umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Laporan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan mengacu pada ketentuan pelaporan bagi Pejabat Eksekutif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum dan Bank Umum Syariah.

Pasal 15

Huruf a

Langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan antara lain pembuatan sistem, program, kerangka pikir (*frame work*), *compliance charter*, kode etik kepatuhan (*compliance code of conduct*), atau kebijakan kepatuhan (*compliance policy*).

Huruf b

Dalam rangka melakukan proses pengelolaan Risiko Kepatuhan, satuan kerja kepatuhan berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko.

Huruf c

Terkait dengan tugas dan tanggungjawab butir c ini, satuan kerja kepatuhan dapat melakukan antara lain:

1. menilai rancangan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur baru;

2. berinisiatif . . .

2. berinisiatif untuk melakukan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur berdasarkan informasi yang diperoleh.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Tugas-tugas lain meliputi antara lain:

1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku;
3. Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.

Pasal 16

Huruf a

Laporan rencana kerja kepatuhan paling kurang terdiri dari:

- a. rencana evaluasi pedoman internal; dan
- b. rencana kegiatan untuk mendorong dan/atau memelihara Budaya Kepatuhan, termasuk rencana sosialisasi ketentuan.

Tata cara penyampaian rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam rencana bisnis Bank dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Rencana Bisnis Bank.

Huruf b . . .

Huruf b

Laporan kepatuhan paling kurang terdiri dari:

- a. pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan;
- b. Risiko Kepatuhan yang dihadapi;
- c. potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi ke depan; dan
- d. mitigasi Risiko Kepatuhan yang telah dilaksanakan.

Laporan kepatuhan tersebut disajikan secara komparatif dalam 2 (dua) periode laporan.

Huruf c

Laporan khusus Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku paling kurang meliputi:

- a. nama Direksi beserta bidang tugasnya;
- b. tanggal pengambilan kebijakan atau keputusan kegiatan;
- c. aktivitas penyimpangan yang dilakukan;
- d. ketentuan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan
- e. dampak yang ditimbulkan untuk jangka pendek dan menengah baik secara financial, gangguan terhadap kelangsungan usaha, maupun penurunan reputasi Bank.

Pasal 17

Ayat (1)

Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur maka laporan wajib disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

Contoh: . . .

Contoh:

Untuk laporan periode Januari sampai dengan Juni 2011, laporan paling lambat disampaikan tanggal 29 Juli 2011 karena tanggal 31 Juli 2011 jatuh pada hari Minggu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contohnya laporan periode Juli sampai dengan Desember 2011, batas akhir waktu penyampaian laporan adalah 31 Januari 2012. Laporan tersebut dinyatakan terlambat disampaikan apabila diterima di Bank Indonesia pada tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2012.

Ayat (4)

Laporan dinyatakan tidak disampaikan apabila sampai dengan tanggal 28 Februari 2012 laporan tidak diterima Bank Indonesia atau diterima Bank Indonesia setelah tanggal 28 Februari 2012.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Pengenaan sanksi kewajiban membayar tersebut tidak menghapus kewajiban yang bersangkutan untuk menyampaikan laporan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

MANUSKRIP WAWANCARA
DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Mendalam Kepada Pihak Lembaga Keuangan Syariah Terkait
Fungsi Audit Syariah Ditinjau Dari Filosofi Keuangan Islam
(Studi Kasus Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi
Barat)

Tanggal : Kamis, 06 Oktober 2016

Waktu : 13.42 WITA

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Ilham Wahid.

Jabatan : Senior Auditor

Wilayah kerja : Bank Sulselbar Syariah

1. Pembuka wawancara
Assalamualaikum, Maaf pak saya mengganggu, saya ingin meminta waktu bapak beberapa lama terkait dengan penelitian tentang dewan pengawas syariah dalam rangka menyelesaikan tugas akhirdi kampus. Penelitian yang saya lakukan terkait dengan kepatuhan dewan pengawas syariah ditinjau dari filosofi keuangan islam. Mohon bapak berkenan untuk memberikan waktu dan informasi terkait obyek penelitian ini. Segala hal yang menyangkut data perusahaan bapak akan saya simpan dengan baik dan akan dipublikasikan (jika dibutuhkan) dengan bik dan benar, tanpa ada manipulasi di dalamnya. Baiklah pak, saya akan memulai wawancaranya.
2. Apakah di perusahaan Bapak diwajibkan melaksanakan shalat lima waktu? Mohon penjelasan Bapak!
3. Menurut pendapat Bapak, apakah pengertian audit syariah? Mohon penjelasan Bapak!
4. Apakah rujukan audit syariah dalam mengaudit perbankan syariah? Mohon penjelasan Bapak!
5. Menurut pendapat Bapak, bagaimana praktik audit syariah dalam perbankan syariah? Mohon penjelasan Bapak!
6. Bagaimana fungsi audit syariah dalam perbankan syariah?



7. Menurut bapak apakah audit syariah berhubungan dengan dewan pengawas syariah? Mohon penjelasan bapak!
8. Apakah Bapak pernah mendengar tentang Filosofi Keuangan Islam? Mohon penjelasan bapak!
9. Apakah audit syariah yang di terapkan di perusahaan Bapak sesuai denga filosofi keuangan islam?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong – Gowa Tlp. 424835 Fax.424836

MANUSKRIP WAWANCARA

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Mendalam Kepada Pihak Lembaga Keuangan Syariah Terkait
Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah dan Audit Syariah Ditinjau Dari
Filosofi Keuangan Islam (Studi Kasus Pada PT Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat)

Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2016

Waktu : 11.00 WITA

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Mukhlis Sufri

Jabatan : Dewan Pengawas Syariah

Wilayah kerja : Bank Sulselbar Syariah

1. Pembuka wawancara

Assalamualaikum, Maaf pak saya mengganggu, saya ingin meminta waktu bapak beberapa lama terkait dengan penelitian tentang dewan pengawas syariah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir di kampus. Penelitian yang saya lakukan terkait dengan kepatuhan dewan pengawas syariah ditinjau dari filosofi keuangan islam. Mohon bapak berkenan untuk memberikan waktu dan informasi terkait obyek penelitian ini. Segala hal yang menyangkut data perusahaan bapak akan saya simpan dengan baik dan akan dipublikasikan (jika dibutuhkan) dengan baik dan benar, tanpa ada manipulasi di dalamnya. Baiklah pak, saya akan memulai wawancaranya.

2. Apakah di perusahaan bapak diwajibkan melaksanakan shalat lima waktu?

3. Apa pengertian dewan pengawas syariah? Mohon penjelasan bapak!

4. Bagaimana fungsi dari dewan pengawas syariah?
5. Apa yang menunjukkan penerapan kepatuhan syariah yang telah dilaksanakan dewan pengawas syariah? Mohon penjelasan bapak?
6. Apakah dewan pengawas syariah bisa disebut juga sebagai penasehat?
7. Apa rujukan dewan pengawas syariah dalam penerapan kepatuhan syariah? Mohon penjelasan bapak?
8. Bagaimana bentuk kegiatan sosial perusahaan?
9. Apakah dewan pengawas syariah mengetahui tentang kepatuhan syariah? Mohon penjelasan bapak!
10. Apa saja kepatuhan syariah yang harus dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah?
11. Apa rujukan dewan pengawas syariah terkait kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah? Mohon penjelasan bapak!
12. Apakah kepatuhan syariah yang dilaksanakan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap laporan keuangan? Mohon penjelasan bapak!
13. Apakah dewan pengawas syariah berhubungan dengan audit syariah? Mohon penjelasan Bapak!
14. Apakah Bapak pernah mendengar tentang filosofi keuangan islam? Mohon penjelasan Bapak!
15. Apakah dewan pengawas syariah sesuai dengan filosofi keuangan islam? Mohon penjelasan Bapak!



**MANUSKRIP WAWANCARA
DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA**

Daftar Pertanyaan Mendalam Kepada Karyawan Lembaga Keuangan Syariah
Terkait Peran DPS

(Studi Kasus Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan &
Sulawesi Barat)

Hari/Tanggal : Rabu, 23 November 2016

Waktu :15.16 WITA

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Syaiful Anwar

Jabatan : Costumer Service

Wilayah kerja : Bank Sulselbar Syariah Makassar

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Assalamualaikum, maaf Bapak/Ibu saya mengganggu, saya disini seorang peneliti dari UIN Alauddin Makassar, mohon Bapak/Ibu berkenan membantu saya dalam penyelesaian tugas akhir di kampus saya, jika Bapak/Ibu bersedia saya akan memulai pertanyaan.
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui keberadaan dewan pengawas syariah atau DPS?
3. Bagaimana peran DPS di perbankan syariah yang Bapak/Ibu ketahui?
4. Bagaimana fungsi audit syariah di perbankan syariah yang Bapak/Ibu ketahui?



MANUSKRIP WAWANCARA
DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Mendalam Kepada Kepala Keuangan Lembaga Keuangan
Syariah Terkait Fungsi Auditor Internal
(Studi Kasus Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan &
Sulawesi Barat)

Tanggal : 15 November 2016

Waktu : 08.06 WITA

IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Jabatan :

Wilayah kerja :

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Assalamualaikum, maaf Bapak saya mengganggu, saya disini seorang peneliti dari UIN Alauddin Makassar, mohon bapak berkenan membantu saya dalam penyelesaian tugas akhir di kampus saya, jika Bapak bersedia saya akan memulai pertanyaan.
2. Apakah Bapak mengetahui fungsi audit syariah?
3. Bagaimana penerapan fungsi audit syariah di perbankan syariah yang Bapak pimpin?
4. Apa manfaat yang Bapak rasakan dalam penerapan fungsi audit syariah?



MANUSKRIP WAWANCARA
DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Mendalam Kepada Nasabah Lembaga Keuangan Syariah
Terkait Dewan Pengawas Syariah
(Studi Kasus Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan &
Sulawesi Barat)

Tanggal : Kamis, 24 November 2016

Waktu : 10.57 WITA

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Bapak Bahar

Jabatan : Nasabah

Wilayah kerja : -

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Assalamualaikum, maaf Bapak/Ibu saya mengganggu, saya disini seorang peneliti dari UIN Alauddin Makassar, mohon Bapak/Ibu berkenan membantu saya dalam penyelesaian tugas akhir di kampus saya, jika Bapak/Ibu bersedia saya akan memulai pertanyaan.
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang keberadaan dewan pengawas syariah atau DPS di Bank Sulselbar Syariah?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah peran DPS di perbankan syariah?

PUBLIKASI PELAKSANAAN PENELITIAN



Gambar 1: Tempat melayani nasabah perbankan PT. Bank Sulselbar Syariah



Gambar 2: Tempat melayani nasabah perbankan PT. Bank Sulselbar Syariah yang dilakukan oleh Customer Service



Gambar 3: Tempat melayani nasabah perbankan PT. Bank Sulselbar Syariah pada pelayanan Customer Service



Gambar 4



Gambar 5: Foto dengan Bapak Syaiful Anwar bertugas sebagai Customer Service



Gambar 6: Foto wawancara dengan nara sumber selaku nasabah perbankan

Perihal: Pengajuan Judul Skripsi

48

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Akuntansi

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hariyanti
NIM : 10800111049
Jurusan : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)

Dalam rangka penyelesaian studi program Akuntansi S1. Maka dengan ini mengajukan beberapa judul skripsi:

No	Judul Yang Diajukan	Paradigma	Keterangan	Paraf
1.	Perlakuan aset tidak berwujud yang merupakan bagian dari zakat pada lembaga keuangan syariah	Kualitatif		
2.	Kepatuhan dewan pengawas syariah dan fungsi audit syariah ditinjau dari filosofi keuangan islam pada lembaga keuangan syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Sulselbar Syariah di Makassar)	Kuantitatif		
3.	Analisis implementasi dan konsep akuntansi zakat perusahaan serta peran dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah	Kualitatif		

Demikian surat pengajuan judul skripsi ini dibuat, atas perhatiannya dihaturkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PB I : WAHYUDDIN ABDULLAH

PB II : TAMRIN LOGAWALI

Samata-Gowa, 02 Februari 2015
Mahasiswa yang bersangkutan

Hariyanti

NIM: 10800111049

24/4/2015
Buatan skripsi



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 503 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN Akuntansi FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca :** Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Hariyanti**, Nim: **10800111049** tertanggal **24 April 2015** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "**Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah dan Fungsi Audit Syariah Ditinjau Dari Filosofi Keuangan Islam pada Lembaga Keuangan**".
- Menimbang :**
- Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas
 - Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
 - Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
 - Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 Jo tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Pertama :** Mengangkat/ Menunjuk saudara :
- Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.**, Sebagai Pembimbing Pertama.
 - Drs. Thamrin Logawali, M.H.**, Sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua :** Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Disetujui di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 29 April 2015
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag

Hal : PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL

Makassar, 18 Januari 2016

082 394418560

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Yang bertandatangan dibawah ini, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar :

Nama : Hariyanti

NIM : 10800111049

Semester : IX(Sembilan)

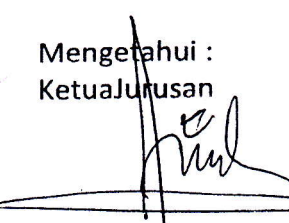
Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi :Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah dan Fungsi Audit Syariah Ditinjau dari Filosofi Keuangan Islam Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Di Makassar)

Demikian Permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih,
Wassalam

Mengetahui :
Ketua Jurusan

Yang bermohon


(Jamaluddin Majid, E., M.Si)
NIP. 19720611 200 1 013


(Hariyanti)

Disposisi

Ujian Proposal tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tim Seminar Proposal :
 - Ketua :
 - Sekretaris :
 - Pembimbing I :Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M. Si., Ak.
 - Pembimbing II :Drs. Thamrin Logawali, M. H.
 - Penguji I :
 - Penguji II :
 - Penguji III :
 - Pelaksana :
2. Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- Hari/Tanggal/Jam :

Makassar, Januari 2016

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam

Nomor : EB.I/PP.00.9/ 122 /2016
Lampiran : -
Hal : **Undangan Seminar Proposal**
A.n. Hariyanti/10800111049

Samata, 27 Januari 2016

Kepada Yth:

1. Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak. Sebagai Pembimbing I
2. Drs. Thamrin Lagowali, SH., MH. Sebagai Pembimbing II

Di

Tempat

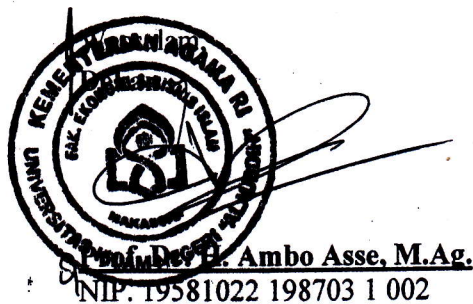
Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami mengundang bapak, untuk menghadiri seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku pembimbing pada Seminar Draft Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Januari 2016
Waktu : 09.00 - Selesai
Judul Skripsi : Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah dan Fungsi Audit Syariah Ditinjau Dari Filosofi Keuangan Islam Pada Lembaga Keuangan Syariah

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ruangan L.202

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

Catatan:

1. SK Pembimbing Draft Skripsi Terlampir
2. Pembimbing diharapkan hadir

Nomor : EB.I/PP.00.9/ 306572016
Lamp : -
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Samata, 22 Agustus 2016

Kepada,

Yth. Kepala UPT P2T BKPMD
Prov. Sulawesi Selatan

Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama	: Hariyanti
NIM	: 10800111049
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Akuntansi
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: Jl. Bontotangnga

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya **“Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah dan Fungsi Audit Syariah Ditinjau dari Filosofi Keuangan Islam Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Sulselbar)”**

Dengan dosen pembimbing : 1. **Dr. M. Wahyuddin A., SE, M.Si., Ak.**
2. **Drs. Thamrin Logawali, M. H.**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di **PT. Bank Sulselbar**.
Demikian harapan kami dan terima kasih.

Wassalam
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

Tembusan :

1. *Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa*
2. *Mahasiswa yang bersangkutan*
3. *Arsip*



1 2 0 1 6 1 9 1 4 2 1 2 0 7 6

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 11743/S.01P/P2T/08/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Pimpinan PT. Bank Sulselbar Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : EB.I/PP.00.09/3065/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : HARIYANTI
Nomor Pokok : 10800111049
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" KEPATUHAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN FUNGSI AUDIT SYARIAH DITINJAU DARI FILOSOFI. KEUANGAN ISLAM PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT. BANK SULSELBAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **25 Agustus s/d 25 September 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 22 Agustus 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A.P.M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar;
2. Peringgal

Nomor : SR/1699 /B/GSM/VIII/2016
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Makassar, 24 Agustus 2016

Kepada Yth,
Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

Menunjuk surat Saudara No. 11743/S.01P/P2T/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016 Perihal Izin Penelitian, dengan ini disampaikan pada prinsipnya kami berkenan menerima Mahasiswa(i) Saudara atas nama :

- Nama : Hariyanti
- Nomor Pokok : 10800111049
- Program Studi : Akuntansi

Untuk melaksanakan Pengambilan Data Ilmiah / Penelitian pada PT. Bank Sulselbar dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir / Skripsi dengan judul *"Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah dan Fungsi Audit Syariah ditinjau dari Filosofi Keuangan Islam pada Lembaga Keuangan Syariah (studi kasus pada PT. Bank Sulselbar)"* dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mematuhi Peraturan Bank yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu melapor kepada Pemimpin Grup SDM PT. Bank Sulselbar.
3. Tidak diperkenankan mengambil data yang bersifat rahasia
4. Setelah selesai mengadakan penelitian, wajib menyerahkan copy penelitian kepada Grup SDM PT. Bank Sulselbar.

Adapun pembimbing sebagai *contact person* adalah Pemimpin Unit Kerja dimana yang bersangkutan mengambil data.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PT.BANK SULSELBAR
Grup Sumber Daya Manusia

Dian Anggriani Utina
Pemimpin

Tembusan :

- Grup Audit Intern PT. Bank Sulselbar
- Arsip

Hal : PERMOHONAN UJIAN KOMPREHENSIF

Makassar, 18 Agustus 2016

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Assalamu Alaikum Wr.Wb

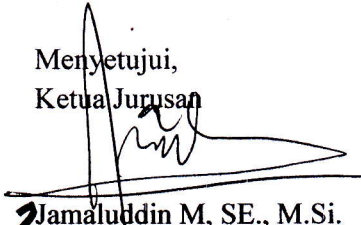
Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar :

Nama : Hariyanti
NIM : 10800111049
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah dan Fungsi Audit Syariah Ditinjau dari Filosofi Keuangan Islam Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Sulselbar Syariah Di Makassar) .


Demikian Permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Menyetujui,
Ketua Jurusan


Jamaluddin M, SE., M.Si.
NIP. 19720611 200801 1 013

Yang bermohon


Hariyanti
NIM. 10800111049

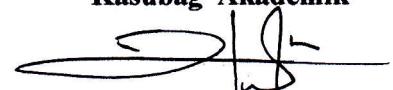
Disposisi:

Ujian Komprehensif tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tim Seminar Hasil :
 - Ketua :
 - Sekretaris :
 - Pembimbing I : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah SE., M. Si., Ak
 - Pembimbing II : Drs. Thamrin Logawali, M. H
 - Penguji I :
 - Penguji II :
 - Penguji III :
 - Pelaksana :
2. Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Hari/Tanggal/Jam :

Makassar, 18 Agustus 2016

a.n. Dekan,
Kasubag Akademik


Nurmiah Muin S. IP MM

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1093 TAHUN 2016**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif **Hariyanti** : , NIM: 10800111049
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- | | |
|-----------------------------------|--|
| Ketua | : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. |
| Sekretaris | : Drs. H. M. Ridwan., M.Si |
| Penguji Dirasah Islamiyah | : Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag. |
| Penguji Akuntansi Keuangan | : Mustakim Muchlis, SE., M.Si. |
| Penguji Auditing | : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak. |
| Pelaksana | : Drs. Baharuddin |
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 28 September 2016



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

Hal : PERMOHONAN SEMINAR HASIL

Makassar, Januari 2017

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Assalamu Alaikum Wr.Wb

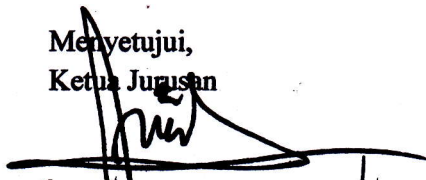
Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar :

Nama : Hariyanti
NIM : 10800111049
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah dan Fungsi Audit Syariah Ditinjau dari Filosofi Keuangan Islam Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Sulselbar Syariah Di Makassar) .


Demikian Permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Menyetujui,
Ketua Jurusan


Jamaluddin M. SE., M.Si.
NIP. 19720611 200801 1 013

Yang bermohon


Hariyanti
NIM. 10800111049

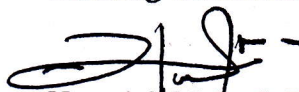
Disposisi:

Ujian Komprehensif tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tim Seminar Hasil :
 - Ketua :
 - Sekretaris :
 - Pembimbing I : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah SE., M. Si., Ak
 - Pembimbing II : Drs. Thamrin Logawali, M. H
 - Penguji I :
 - Penguji II :
 - Penguji III :
 - Pelaksana :
2. Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- Hari/Tanggal/Jam :

Makassar, 9 Januari 2017

a.n. Dekan,
Kasubag Akademik



Nomor : 643 /EB.1/PP.00.9/2016
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Undangan Seminar Hasil

Samata, 26 Januari 2017

Kepada Yth
Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : Hariyanti
NIM : 10800111049
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Keputusan Dewan Pengawas Syariah dan Fungsi Audit Syariah Ditinjau dari Filosofi Keuangan Islam pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada PT Bank SulSelBar Syariah di Makassar)

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 27 Januari 2017
Waktu : 09.00 - Selesai
Tempat : Ruang L.102

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 116 TAHUN 2017**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.Hariyanti, NIM : 10800111049
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Nama : Hariyanti, NIM : 10800111049, tertanggal 18 Januari 2017** untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

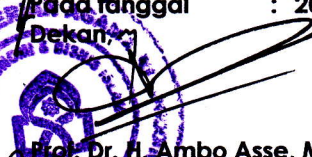

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekretaris : Jamaluddin M., SE., M.Si.
Pembimbing I : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.
Pembimbing II : Drs. Thamrin Logawali, MH.
Penguji I : Memen Suwandi, SE., M.Si.
Penguji II : Saiful, SE., M.SA., Ak.
Pelaksana : Fakhrunnisa Thamrin, SE.

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 20 Januari 2017
Dekan, 

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Arsip

Nomor : 1536/EB.1/PP.00.9/2016

Samata, 16 Februari 2017

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Ujian Munaqasyah

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : Hariyanti
NIM : 10800111049
Jurusan : AKUNTANSI
Judul Skripsi : "Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah dan Fungsi Audit Syariah Ditinjau dari Filosofi keuangan Islam pada Lembaga keuangan Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Sulselbar syariah di Makassar)"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Februari 2017
Waktu : 09.00 - Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan



Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 214 TAHUN 2017**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : Harlyanti
NIM : 10800111049
Tanggal : 07 Februari 2017
Mahasiswa Jurusan : Akuntansi
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "**Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah dan Fungsi Audit Syariah Ditinjau dari Filosofi keuangan Islam pada Lembaga keuangan Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Sulselbar syariah di Makassar)**"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekretaris : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Penguji I : Memen Suwandli, SE., M.Si.
Penguji II : Saiful, SE., M.SA., Ak
Pembimbing I : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si. Ak.
Pembimbing II : Drs. Thamrin Logawall, MH.
Pelaksana : Drs. H. M. Ridwan, M.Si.

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 07 Februari 2017



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198702 1 000